

**ANALISIS PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA BERBASIS  
INKLUSI SOSIAL OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**Bulkisma Putri**

NIM. 180503013

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**ANALISIS PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA BERBASIS INKLUSI  
SOSIAL OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ACEH  
TENGAH**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry**

**Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi**

**Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan**

**Diajukan Oleh:**

**BULKISMA PUTRI**

**NIM. 180503013**

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora**

**Prodi Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan**

**Disetujui Oleh:**

**جامعة الرانيري**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Nazaruddin, M.LIS.,Ph.D**

**NIP. 197101101999031002**



**Asnawi, S.IP.,M.IP**

**NIP. 198811222020121010**

# SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu  
(S1) Ilmu Perpustakaan

Pada/Hari Tanggal

Senin, 12 Desember 2022 M

18 Jumadil Awal 1444 H

Darussalam-Banda Aceh

## PANITIA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Nazaruddin, M.LIS., Ph.D  
NIP. 197101101999031002

Sekretaris

Asnawi, S.IP., M.IP  
NIP. 198811222020121010

Penguji I

Drs. Saifuddin A. Rasyid, M. LIS  
NIP. 196002052000031001

Penguji II

Nurul Rahmt, S.IP., MA  
NIDN. 2031079202

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Darussalam – Banda Aceh



Syarifuddin, M.A., Ph.D

NIP. 197001011997031005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bulkisma Putri

NIM : 180503013

Jenjang : Strata Satu (S1)

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Judul Skripsi : Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah asli karya saya sendiri, dan jika kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberi sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Desember 2022



Yang menyatakan,

Bulkisma Putri

NIM. 180503013

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai karunia berupa kesejahteraan, kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa dorongan, semangat, sumbangan pikiran, serta materi dari berbagai pihak.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ayahanda M.Rizal dan Ibunda Irawati S.Pd, Abang Ulian Ihda, Adik Raihan Putra serta seluruh keluarga yang telah memberikan Do’a, Nasehat, Kasih sayang serta dukungan baik moril maupun materi kepada penulis.

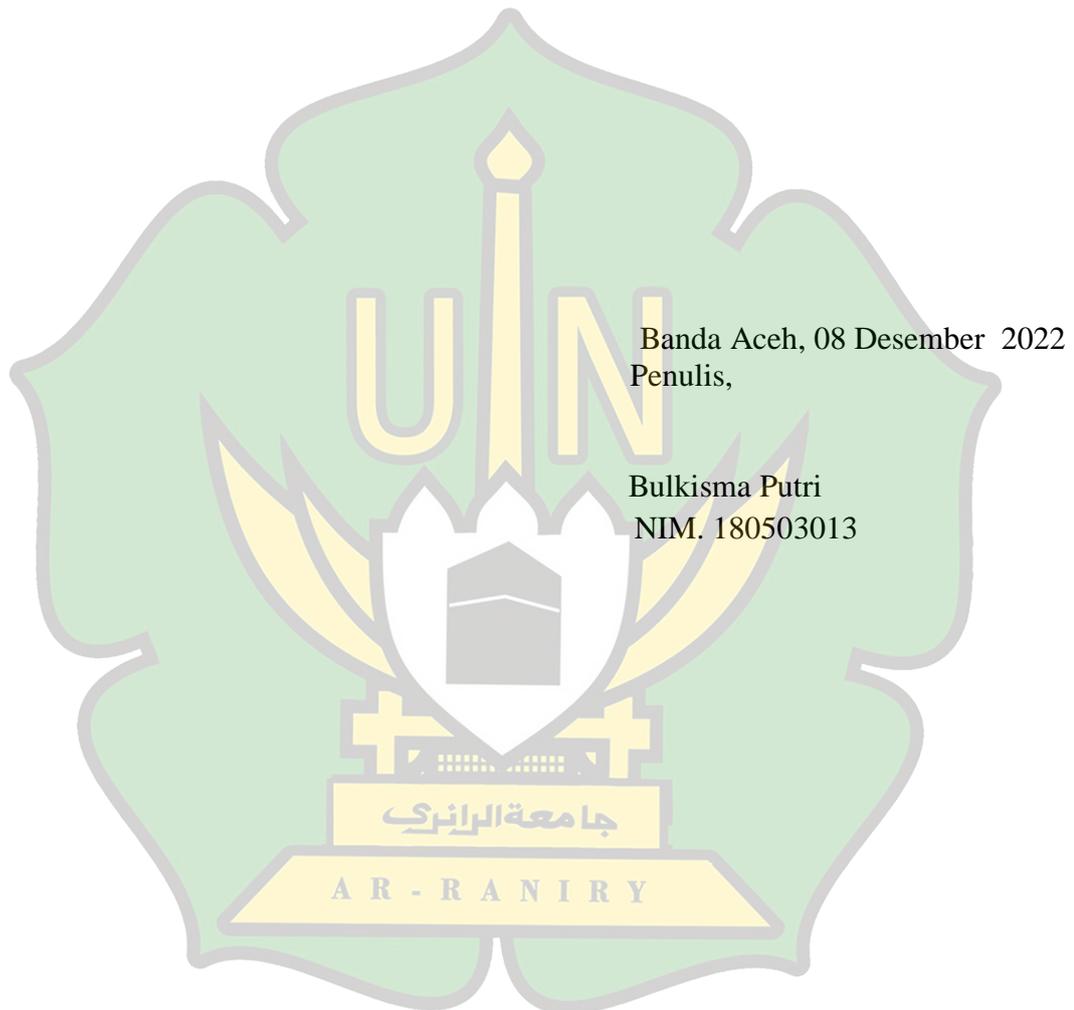
Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Nazaruddin, M.LIS., Ph.D. selaku pembimbing pertama dan Bapak Asnawi, M.IP selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan pengarahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Syarifuddin M.Ag., Ph.D selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.

3. Bapak Mukhtaruddin, M.LIS selaku ketua Prodi dan Penasehat Akademik serta Bapak Mulkan selaku sekretaris Prodi.
4. Serta Dosen-Dosen Ilmu Perpustakaan, dan seluruh staf Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Ucapan terimakasih juga kepada Ibu Sukmawati, SH, Bapak Jeffridin Siregar, AP., MM, seluruh staff Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Ibu Novita Rahmayanti S.Pd, Ibu Ramlana Safitri S.IP dan Ibu Saumi Mahara S.Pd I, M.Pd pengelola perpustakaan desa yang telah membantu dan membimbing penulis selama jalannya penelitian.
6. Ucapan terimakasih kepada sahabat tercinta M. Saryulis HR, Shavira dan Wilda Num Nafsiah yang telah memberikan do'a, semangat saran dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih kepada teman-teman Vina Anjely, Maulida, Sri Nadia Utami, Fazria Anggina, Aina Selvia, Vina Yanti, Yuni Bahgie dan seluruh teman-teman Angkatan 2018 Ilmu Perpustakaan yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada diriku sendiri Bulkisma Putri yang sudah begitu kuat dan bertahan sejauh ini dalam menyelesaikan skripsi dan studi S1 Ilmu Perpustakaan.

Kebehasilan selalu datang dari Allah SWT dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik

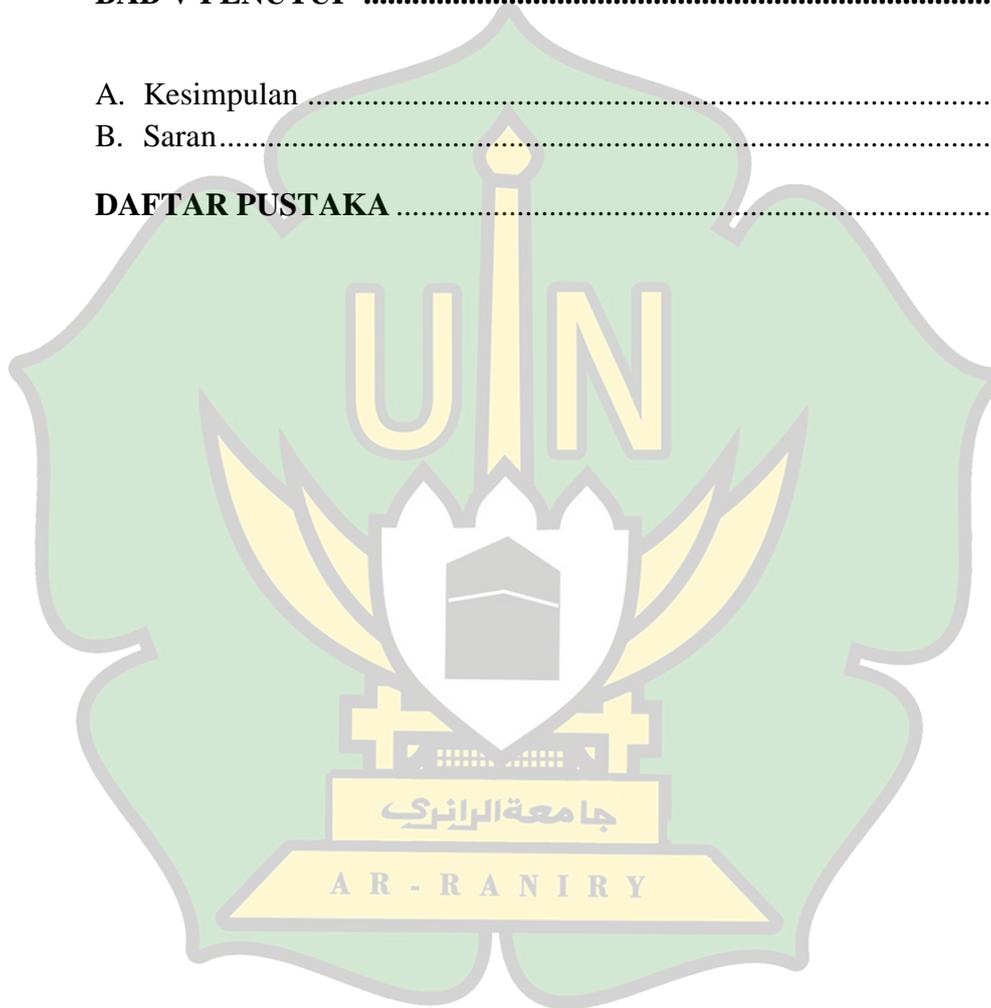
dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Terimakasih penulis ucapkan juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Aamiin



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka .....	11
B. Perpustakaan Umum .....	15
1. Pengertian Perpustakaan Umum .....	15
2. Peran Perpustakaan Umum .....	16
3. Fungsi dan tugas Perpustakaan Umum .....	18
4. Peran perpustakaan Umum dalam Pengembangan Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial .....	21
C. Perpustakaan Desa .....	24
1. Pengertian Perpustakaan Desa .....	24
2. Fungsi Perpustakaan Desa.....	25
3. Tujuan Perpustakaan Desa .....	27
D. Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial .....	29
1. Pengertian Inklusi Sosial.....	29
2. Pengertian Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial .....	31
3. Tujuan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Soisal.....	34
4. Dasar Hukum Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian .....	39
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42

F. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian dan pembahasan .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi dari Dekan Fakultas  
Adab dan Humaniora

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Ar-Raniry

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Aceh Tengah

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Perpustakaan Desa Kala Kemili

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru

Lampiran 6 Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, “Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dan apa saja kendala dalam pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan layanan perpustakaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui kendala dalam pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh yaitu pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu, pemberian fasilitas kepada perpustakaan desa, sosialisasi, bimtek pengelola perpustakaan, bimtek revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, advokasi, *peerlearning Meeting* (PLM), *stake holder meeting*, dan pelibatan masyarakat. Adapun kendalanya yaitu keterbatasan anggaran, rendahnya SDM, dan kurangnya dukungan pemerintah desa

**Kata Kunci:** Inklusi Sosial, Perpustakaan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat membutuhkan informasi yang perlu didukung oleh keberadaan sarana seperti perpustakaan, perpustakaan menjadi wadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan. Perpustakaan yang menyediakan informasi bagi setiap lapisan masyarakat ialah perpustakaan umum, perpustakaan umum dibentuk untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, gender maupun strata sosial. perpustakaan umum menjadi sarana pendidikan yang dapat digunakan masyarakat secara demokratis karena menyediakan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Sejatinya, perpustakaan yang melayani masyarakat pada umumnya harus menyediakan fasilitas, koleksi, dan layanan yang membantu setiap lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, dewasa, lanjut usia, pelajar, dan individu berkebutuhan khusus dan yang belum menemukan pekerjaan tanpa meninggalkan sekelompok masyarakat tersebut. Dalam hal ini yang menjadi acuan untuk perpustakaan bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Inklusi sosial hadir dalam dunia perpustakaan pada tahun 1999 melalui dokumen *Libraries for all Social Inclusion In Public Libraries Policy Guidance*

---

<sup>1</sup> Mussuryani, *Peran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Dalam Menumbuhkan Budaya Literasi Masyarakat Kabupaten Tebo* (Skripsi:Uin Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

*for Local Authorities In England October 1999*. Dalam dokumen ini terdapat 7 pembahasan yaitu ; (1) perlunya inklusi sosial di bidang perpustakaan umum, (2) konteks inklusi sosial, (3) identifikasi dan hambatan keterlibatan masyarakat,(4) kebijakan inklusi sosial, (5) sarana untuk mencapai tujuan, (6) tantangan yang dihadapi perpustakaan, (7) proses konsultasi. Konsep inklusi sosial dalam dunia perpustakaan mengacu pada semua upaya untuk mencapai kesetaraan dalam masyarakat, memberi kesempatan pada setiap orang untuk memanfaatkan perpustakaan tanpa adanya unsur kesenjangan.<sup>2</sup>

Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi program prioritas nasional yang digaungkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan tujuan memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas SDM, peningkatan kemampuan literasi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan bagian dari 17 cakupan *Sustainable Development Goals* atau di Indonesia lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, di mana istilah pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan antara lain pengentasan kemiskinan, kelaparan, membangun kehidupan sejahtera dan sehat, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak pertumbuhan ekonomi dan masih banyak lagi yang pada intinya untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Khairunisa, *Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat ( Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi)*2507, (Skripsi:Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi) , <http://repository.uinjambi.ac.id>.

<sup>3</sup> Rani Auliawati Rahman, *Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Membaca Malang*,(Skripsi:Universitas Padjajaran).

Perpusnas sebagai pemegang kendali dalam mengembangkan program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam pengembangannya memiliki sasaran program yang dilakukan yaitu melakukan pembinaan kelembagaan perpustakaan provinsi, memberikan bantuan koleksi berupa buku untuk perpustakaan kabupaten dan desa/kelurahan, memberikan bantuan perangkat komputer untuk perpustakaan kabupaten dan desa/kelurahan, memberikan bimbingan teknis pengelola perpustakaan kabupaten desa/ kelurahan serta melaksanakan *peer learning meeting* nasional sebagai wadah untuk berdiskusi antar pengelola perpustakaan diseluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 21 provinsi di Indonesia yang ditunjuk pemerintah Indonesia melalui Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 untuk melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, program tersebut dilakukan pada beberapa perpustakaan umum di provinsi Aceh, yaitu perpustakaan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Besar, Nagan Raya dan Bener Meriah di Kabupaten Aceh Besar perpustakaan gampong yang telah bertransformasi menjadi perpustakaan dengan layanan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan gampong Lambirah dan perpustakaan gampong Pulo Aceh.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu perpustakaan umum yang melaksanakan program perpustakaan berbasis

---

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Kalbar, 2019

inklusi sosial, adapun yang dimaksud dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ialah suatu pendekatan pelayanan pada perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, program ini dilaksanakan dengan kegiatan pelibatan masyarakat tanpa terkecuali dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi awal penulis, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan dan mengembangkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2018, pada tahun 2019 menggandeng perpustakaan desa yang berada di Kabupaten Aceh Tengah untuk di kembangkan memiliki layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, tumbuh dan kembangnya perpustakaan desa merupakan tanggung jawab perpustakaan daerah atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan suatu daerah karena perpustakaan desa merupakan perpanjangan tangan layanan dari perpustakaan daerah, untuk itu perpustakaan yang berada di desa perlu dikembangkan salah satunya melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Hasil wawancara dengan ibu Sukmawati, SH dari bidang pengembangan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, pada saat melakukan observasi awal, dalam upaya pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan kabupaten Aceh Tengah menyiapkan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan dan pembinaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Ada

---

<sup>5</sup> Humas Arpus Aceh, "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Upaya Pemerintah Mengentas Kemiskinan," 2022, <http://arpus.acehprov.go.id>.

beberapa kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Adapun kegiatan tersebut yaitu melaksanakan bimbingan teknis terkait layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi pengelola perpustakaan desa selanjutnya melaksanakan bimbingan revitalisasi bagi perpustakaan desa yang dianggap memenuhi kriteria sebagai perpustakaan desa yang dapat dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah juga melaksanakan kegiatan pembinaan bagi perpustakaan desa yang dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam mengelola dan mengolah hasil bumi di bidang pertanian dan perkebunan serta membuat produk berdasarkan budaya setempat yang bernilai jual sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, perpustakaan yang ikut dibina dalam pengelolaan dan pengolahan hasil bumi serta produk budaya setempat tersebut tersebut terdiri dari 10 unit perpustakaan dengan masing-masing perpustakaan memiliki produk yang bernilai jual, perpustakaan desa tersebut yaitu Perpustakaan desa Tebes Lues, Perpustakaan desa Paya Tumpi Baru, Perpustakaan desa Blang Mancung, Perpustakaan desa Kung, Perpustakaan desa Jagong Jeget, Perpustakaan - desa Mongal, Perpustakaan desa Kemili, Perpustakaan desa Kelitu, Perpustakaan desa Arul Latong dan Perpustakaan desa Kala Kemili, salah satu pengolahan hasil bumi di bidang pertanian dan perkebunan tersebut dilakukan oleh masyarakat pada perpustakaan desa Tebes Lues kecamatan Bies kabupaten Aceh Tengah, di mana hasil bumi yang di olah yaitu tanaman kopi, perpustakaan desa Tebes Lues mengolah kopi menjadi minuman yang dinamai dengan Kopi Kertup dan perpustakaan desa yang

membuat produk berdasarkan budaya setempat yaitu perpustakaan desa Paya Tumpi baru yaitu membuat kerajinan kerawang gayo.

Dilihat dari kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berada di perpustakaan desa memiliki respon yang cukup baik, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna perpustakaan secara langsung dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di desa tersebut, maka dari itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah juga harus memiliki rancangan agenda untuk program-program yang menunjang pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Untuk itu, peneliti tertarik mengetahui lebih jauh tentang upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, Sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah “.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apa saja kendala dalam pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial .

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan eksistensi perpustakaan, khususnya dalam mewujudkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada perpustakaan desa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat dijadikan bahan materi atau referensi dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
  - b. Dapat dijadikan acuan yang berguna dalam mengoptimalkan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial terhadap pengguna perpustakaan.
  - c. Dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dari pembaca serta memberikan penjelasan serta penegasan istilah-istilah dan artinya, maka penulis memberikan penjelasan tentang konsep-konsep ini dengan menggunakan rumus-rumus yang sering digunakan dalam literatur ilmiah, sebagai berikut:

### 1. Analisis

Menurut Komaruddin, menganalisis adalah proses menguraikan sesuatu keseluruhan menjadi komponen-komponen untuk lebih memahami bagian-bagian komponen tersebut, hubungannya dan bagaimana mereka berkontribusi pada keseluruhan yang terpadu.<sup>6</sup>

Dengan demikian analisis yang dimaksud dalam penelitian adalah mencermati dan menguraikan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Aceh Tengah.

### 2. Perpustakaan Desa

Menurut Putra, adapun pengertian dari perpustakaan desa ialah suatu lembaga layanan publik yang berada di desa/sebuah unit layanan yang dikembangkan dari oleh dan untuk masyarakat desa, perpustakaan desa

---

<sup>6</sup> Yuni Septiani, Edo Aribbe, dan Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)," *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (2020): 131–43, <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>.

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan keterampilan masyarakat.<sup>7</sup> Perpustakaan Desa merupakan perpustakaan umum yang berada di tingkat pemerintahan desa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Singkatnya dapat disimpulkan perpustakaan desa merupakan perpustakaan umum yang berada di sebuah desa yang bertujuan untuk memenuhi segala informasi yang dibutuhkan masyarakat pedesaan di mana perpustakaan desa tersebut berada, perpustakaan tersebut selain sebagai wadah dalam menyediakan sumber informasi juga berfungsi sebagai sarana penunjang kegiatan yang ada dalam masyarakat juga sebagai wadah dalam menunjang pendidikan formal maupun nonformal masyarakat.

Adapun perpustakaan desa yang peneliti maksud dalam penelitian ini ada perpustakaan desa yang dibina dan dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan tujuan perpustakaan yang berada di desa tersebut dapat mengoptimalkan layanan bagi masyarakat, adapun perpustakaan desa tersebut yaitu Perpustakaan desa Tebes Lues, Perpustakaan desa Paya Tumpi Baru dan Perpustakaan desa Kala Kemili.

### **3. Inklusi Sosial**

Inklusi sosial yang didefinisikan oleh Simarmata, adalah suatu proses yang memungkinkan kelompok masyarakat atau individu tertentu untuk ikut terlibat dalam kehidupan sosial baik secara penuh maupun sebagian. Definisi

---

<sup>7</sup> Purwanto Putra dan Siti Khoiriyah, *Manajemen Perpustakaan Desa* (Bandar Lampung: Yayasan Petualang Literasi, 2020), <http://repository.lppm.unila.ac.id>.

inklusi sosial merupakan lawan kata dari eksklusi sosial , di mana eksklusi sosial yang berarti keadaan pemisahan terhadap komunitas, individu atau sebagian kelompok yang menyebabkan munculnya dampak seperti hilangnya kemauan untuk berbaur,keterasingan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Perpustakaan bertransformasi menjadi perpustakaan dengan layanan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sebagai pengguna perpustakaan dengan menguatkan peran dan fungsi perpustakaan, mengembangkan kreatifitas yang dimiliki setiap individu tanpa terkecuali sesuai dengan konsep inklusi sosial.

Adapun Inklusi sosial yang penulis maksud adalah pendekatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dengan melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat pada lingkungan perpustakaan desa, yaitu kegiatan yang menunjang potensi dan keterampilan masyarakat seperti pengolahan hasil bumi dan lainnya.

---

<sup>8</sup> Prima Putra, Budi Gutama, dan Bambang Widiyahseno, "Inklusi sosial dalam pembangunan desa" 10 (2020): 70–80.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Berdasarkan literatur yang peneliti telusuri, terdapat beberapa publikasi dengan judul “Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah” dalam literatur yang dianalisis. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini dan menghindari plagiarisme untuk data yang digunakan dalam penelitian ini, serta memberi kontribusi pada penelitian yang ada. Maka sangat penting untuk menjelaskan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya, seperti:

Pertama, Isna Thia Riyanda dalam penelitiannya berjudul “Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Perpustakaan Desa Sekip Kabupaten Deli Serdang Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat “. Mengetahui bagaimana pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada perpustakaan desa Sekip kabupaten Deli Serdang dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan dari penelitian Isna Thia Riyanda. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif, adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian Isna Thia Riyanda, adapun hasil yang ditemukan adalah Pengembangan perpustakaan Desa Sekip dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat mampu memberikan hasil yang cukup baik pada peningkatan usaha dan perekonomian masyarakat desa Sekip, namun dalam penelitiannya masih terdapat beberapa

kendala yang dihadapi pihak perpustakaan desa dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan perpustakaan.<sup>9</sup>

Menurut hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, perbedaannya yaitu penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan melihat dan menganalisis mengenai pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isna Thia Riyanda menganalisis mengenai perkembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Adapun persamaan yang terdapat antara dua penelitian ini yaitu dalam jenis dan metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian kedua oleh Indah Setiawani penelitiannya berjudul “Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Dampaknya terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Penelitian di Desa Paya Tumpi Baru Aceh Tengah). Tujuan dari penelitian Indah Setiawani ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai pengimplementasian perpustakaan berbasis inklusi sosial dan dampaknya terhadap UMKM di desa Paya Tumpi Baru Aceh Tengah, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis

---

<sup>9</sup> Isna Thia Riyanda, “Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Desa Sekip Kabupaten Deli Serdang Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 1, no. 3 (2021): 82–91.

deskriptif, dan teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan oleh Indah Setiawani ini ialah melalui wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah perpustakaan desa di Desa Paya Tumpi Baru sudah bertransformasi ke perpustakaan berbasis inklusi sosial, strategi yang dilakukan ialah dengan mengaktifkan peran pustakawan dan penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial berdampak pada UMKM yang ada di desa dan berdampak pada meningkatnya penjualan pada usahanya .<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian Indah Setiawani dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada fokus penelitian di mana fokus penelitian Indah Setiawani terfokus pada perekonomian UMKM masyarakat melalui implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan ialah terfokus pada pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada jenis penelitian, di mana kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi)” oleh Khairunissa yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai

---

<sup>10</sup> Indah Setiawani, “Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ( Penelitian di Desa Paya Tumpi baru Aceh Tengah ).,” no. 1996 (2021): 6.49

upaya mewujudkan masyarakat literat di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, kendala dalam upaya mewujudkan masyarakat literat, dan upaya dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, yaitu melibatkan peran aktif pustakawan, mengeluarkan regulasi kebijakan dan pembentukan tim sinergi, melakukan *Stakeholder Meeting*, launching I pustaka Jambi, dan melakukan kegiatan *peer Learning Meeting*. Namun Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi juga mengalami beberapa kendala dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, diantaranya yaitu keterbatasan dan jaringan internet. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari tingkat provinsi, kabupaten maupun swasta, serta mengoptimalkan anggaran yang ada seoptimal mungkin.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, tentunya ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun perbedaan penelitian khairunissa dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada tujuan penelitian, dan subjek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan di Dinas Perpustakaan Arsip Kota Jambi yang tujuan penelitian nya sendiri adalah

---

<sup>11</sup> Khairunisa, "Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi)."

untuk mengetahui strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang literat. Sedangkan pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan perpustakaan desa oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui kendala dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tersebut. Subjek dalam penelitian sebelumnya berjumlah 3 orang, yaitu kepala seksi bidang pembinaan dan pengembangan kegemaran membaca, kepala Dinas Perpustakaan Arsip daerah Kota Jambi, dan Pustakawan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam penelitian ini informan berjumlah 5 orang, yaitu kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Staff bidang pengembangan dan pembinaan bahan pustaka, pengelola perpustakaan desa Kala Kemili, pengelola perpustakaan desa Tebes Lues dan pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif.

## **B. PERPUSTAKAAN UMUM**

### **1. Pengertian Perpustakaan Umum**

Perpustakaan umum merupakan lembaga yang menyediakan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat secara umum dengan menyediakan semua kebutuhan sebagai bahan bacaan maupun edukasi dengan jangka waktu yang berkelanjutan<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yesaya Yehuda, *Sistem Pelayanan Terbuka Pada Interior Perpustakaan Umum di Kota Semarang, Jurnal Intra* (2017): 964–69, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 dari situs: <https://media.neliti.com/media/publications/102910-ID-sistem-pelayanan-terbuka-pada-interior-p.pdf>.

Pamuntjak mendefinisikan perpustakaan umum sebagai tempat menghimpun koleksi, terbitan berkala, dan dokumen lain untuk kepentingan masyarakat luas. Perpustakaan umum dibangun sebagai lembaga yang terbuka dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan setiap masyarakat dapat menggunakan layanan dan koleksi yang ada di perpustakaan tanpa dibedakan pekerjaan, kedudukan, kebudayaan, dan agama.<sup>13</sup>

Lebih lanjut perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 43 Tahun 2007 adalah perpustakaan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, memiliki koleksi yang mencerminkan budaya setempat, dan terbuka untuk semua anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang atau orientasinya.<sup>14</sup>

## **2. Peran Perpustakaan Umum**

Peran perpustakaan memiliki arti sebuah posisi, jabatan, kedudukan dan seperti apa perpustakaan tersebut berupaya memberikan pengaruh dalam masyarakat. Perpustakaan dewasa ini lebih berperan sebagai sarana yang digunakan dalam menemukan informasi, pengetahuan dan lainnya. Berdasarkan UU No 43 Tahun 2007 ada beberapa peran perpustakaan umum tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dapat dijalankan, diantaranya ialah sebagai ,

- a. Wahana pendidikan bagi masyarakat.
- b. Menjadi wahana penelitian dan pelestarian informasi.

---

<sup>13</sup> Nofita Waas, *Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka Di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi (Bpad) Provinsi Sulawesi Utara, Acta Diurna V*, no. 2 (2016): 1–7, Di Akses pada tanggal 13 Agustus 2022 dari situs : <https://www.neliti.com/publications/94909/pendayagunaan-koleksi-bahan-pustaka-di-badan-perpustakaan-arsip-dan-dokumentasi>.

<sup>14</sup>UU RI Nomor 43 Tahun 2007, <https://jdih.perpusnas.go.id>.

- c. Berperan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat umum.
- d. Menjadi lembaga yang menyediakan layanan kepada masyarakat sebagai pengguna perpustakaan.
- e. Berperan dalam meningkatkan minat baca, serta memperluas pengetahuan masyarakat.<sup>15</sup>

Perpustakaan umum daerah berperan di wilayahnya masing-masing, adapun peran tersebut yaitu sebagai:

- a. Lembaga yang menyediakan sarana pendidikan yang bersifat tidak resmi bagi anggota masyarakat secara umum.
- b. Sebagai media penghubung yang berfungsi dalam mengaitkan sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam koleksi di perpustakaan dengan para penggunanya.
- c. Berperan sebagai lembaga yang mengembangkan minat baca, kegemaran membaca dalam masyarakat dan penyedia bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna.
- d. Berperan sebagai media interaksi antar sesama pemakai, pustakawan dan masyarakat secara umum.
- e. Berperan sebagai pusat untuk mengembangkan perpustakaan umum di tingkat pemerintahan kecamatan, desa maupun kelurahan.
- f. Berperan sebagai lembaga yang memiliki kapasitas dalam menginspirasi dan membimbing masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan.

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

- g. Berperan sebagai lembaga yang bersifat membangun, menumbuhkan dan mengembangkan budaya bagi masyarakat layaknya perpustakaan pada umumnya.
- h. Dapat menjadi lembaga yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pusat dalam mengembangkan minat baca bagi masyarakat secara umum.<sup>16</sup>

### 3. Fungsi dan Tugas Perpustakaan Umum

#### a. Fungsi

Fungsi perpustakaan umum adalah suatu kewajiban atau tugas yang harus dilaksanakan dalam perpustakaan tersebut, fungsi dari perpustakaan umum tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas maupun kegiatan yang akan dilakukan dari perpustakaan yang bersangkutan .

Dalam Standar Nasional Perpustakaan tahun 2009 ada beberapa fungsi perpustakaan umum tingkat kabupaten/ kota, yaitu :

- a. Penyediaan koleksi.
- b. Melakukan penghimpunan koleksi.
- c. Menyusun materi perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mendayagunakan koleksi kepada pemustaka.
- e. Mengelola proses pendidikan pengguna.
- f. Menerapkan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Melestarikan koleksi dan materi-materi yang ada di perpustakaan.
- h. Membantu memperluas layanan perpustakaan di daerah<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Mussuryani, *Peran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Dalam Menumbuhkan Budaya Literasi Masyarakat Kabupaten Tebo* ( Skripsi: Uin Sultan Thaha Saifuddin, 2019), hlm 52.

<sup>17</sup> Standar Nasional Perpustakaan, "Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota," 2011, 3.

Perpustakaan umum memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, adapun fungsi tersebut antara lain :

- a. Memilih dan memenuhi bahan bacaan sebagai sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum.
- b. Menyediakan layanan peminjaman koleksi perpustakaan, layanan informasi dan layanan referensi bagi pengguna perpustakaan.
- c. Melakukan pengolahan dan pendayagunaan bahan pustaka dengan teknik-teknik yang biasa digunakan dalam dunia perpustakaan.
- d. Memberikan layanan yang efisien dan sesuai dalam peminjama bahan Pustaka, pencarian informasi serta referensi terhadap pengguna dalam kelancaran tugas instansi.
- e. Menjalin kemitraan dengan instansi lain untuk meningkatkan mutu pengelolaan perpustakaan.
- f. Menyediakan koleksi perpustakaan yang diperlukan pengguna melalui pembelian, langganan, tukar-menukar, dsb.<sup>18</sup>

Dari beberapa fungsi perpustakaan tersebut dapat disimpulkan keberadaan perpustakaan umum daerah adalah sebagai perpustakaan yang tepat guna bagi masyarakat pada suatu daerahnya, menjadi wadah untuk masyarakat mencari informasi dengan menerapkan pelayanan yang efektif.

---

<sup>18</sup> Mussuryani, "Peran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Dalam Menumbuhkan Budaya Literasi Masyarakat Kabupaten Tebo.", 2019), hlm 54.

b. Tugas

Pada dasarnya tugas perpustakaan ialah untuk mendukung dan menanggapi kebutuhan informasi dan pendidikan masyarakat. Jika perpustakaan berhasil mengumpulkan, memilah, melestarikan, dan mendayagunakan bahan pustaka dengan baik, maka layanan yang ada pada perpustakaan akan berfungsi dengan lancar.

Adapun beberapa tugas perpustakaan umum berdasarkan standar nasional Indonesia yaitu:

- a. Menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini.
- b. Mendukung sistem pendidikan formal maupun nonformal.
- c. Menyediakan media pendidikan sepanjang hayat.
- d. Menyediakan fasilitas bagi pengembangan kreativitas diri anggota masyarakat.
- e. Menudukung terselenggaranya pusat budaya masyarakat setempat.
- f. Melakukan kerjasama dalam membentuk jaringan informasi.
- g. Menyediakan sarana dalam pengembangan literasi informasi dan komunikasi.
- h. Mendayagunakan bahan Pustaka serta koleksi berbasis web.
- i. Menjadi penyedia fasilitas dalam belajar dan membaca.
- j. Menyelenggarakan layanan perpustakaan yang berorientasi pada masyarakat salah satunya melalui perpustakaan keliling.
- k. Melakukan pengumpulan data perpustakaan di daerah dan menginformasikan ke pangkalan data perpustakaan nasional.

1. Melakukan pembinaan pada perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa/kelurahan.<sup>19</sup>

Dari beberapa tugas perpustakaan umum tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan perpustakaan memiliki kedudukan yang cukup penting dalam mendukung segala bentuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

#### **4. Peran Perpustakaan Umum dalam Pengembangan Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial**

Perpustakaan desa perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar perpustakaan desa dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan fungsi dan perannya sebagai sumber informasi dan sarana penunjang pembelajaran bagi masyarakat pengguna perpustakaan desa.<sup>20</sup>

Salah satu peran perpustakaan umum tingkat daerah adalah membina dan mengembangkan perpustakaan desa, pembinaan tersebut dilakukan pada perpustakaan desa yang ada di daerah dengan tujuan agar perpustakaan desa dapat terus menjadi perpanjangan tangan pelayanan dari perpustakaan desa. perpustakaan umum tingkat daerah dalam menyediakan sumber informasi bagi masyarakat. Perpustakaan Pengawas, Perpustakaan Referensi, Perpustakaan Penyimpanan, Perpustakaan Riset, dan Perpustakaan Pelestarian merupakan fungsi-fungsi yang berada dalam lingkup perpustakaan umum kota/kabupaten yang dituangkan dalam SNP 2019. Fungsi perpustakaan sebagai perpustakaan

---

<sup>19</sup> Indonesia Perpustakaan Nasional RI, *Standar Nasional Perpustakaan Provinsi, Kab / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan*, 2019.

<sup>20</sup> Dwi Puspita Sari dan Yuli Rohmiyati, "Peran Pembinaan Perpustakaan Pada Eksistensi Perpustakaan Desa Di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 3 (2017): 471–80, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23179>.

pengawas meliputi pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang berada di bawahnya, antara lain perpustakaan kecamatan dan perpustakaan kecamatan/desa.

21

Dewasanya perkembangan dunia perpustakaan di Indonesia kian hari semakin berkembang hal ini dibenarkan dengan adanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. PERPRES No. 72 Tahun 2018 tentang RKP Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembangunan perpustakaan di Indonesia pada tahun 2019 harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai bagian dari program berbasis inklusi sosial Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020 yang lebih besar. Strategi yang digunakan dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan cara :

- a. Penyebaran layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat provinsi, kabupaten / kota dan desa .
- b. Melakukan peningkatan dalam belajar secara efektif.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi.
- e. Bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat terkait perpustakaan.
- f. Pemanfaatan sumber dana secara efektif untuk meningkatkan kualitas kualitas layanan perpustakaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Standar Nasional Perpustakaan Provinsi, Kab / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan.*

Sesuai dengan fungsi perpustakaan umum kabupaten yang harus memelihara perpustakaan desa untuk tumbuh, maka program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilaksanakan secara merata di perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa, pembinaan dan pengembangan pada perpustakaan desa tersebut dapat dilakukan melalui pengimplementasian program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial<sup>23</sup>

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi masyarakat untuk ikut merasakan manfaat dari perpustakaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh perpustakaan umum dapat dilakukan dengan berapa strategi, antara lain:

1. Mengidentifikasi kebutuhan pemustaka yang berada di wilayah perpustakaan desa yang sedang dibina dan dikembangkan, indentifikasi ini dilakukan agar dapat menyesuaikan dan menyediakan koleksi yang berkaitan dengan kehidupan di lingkungan masyarakat.
2. Menyediakan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan masyarakat.
3. Memfasilitasi kegiatan masyarakat, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerjasama dengan perpustakaan desa yang dibina dalam memfasilitasi kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan.

---

<sup>22</sup> Biro Santoso, Joko; Hukum, Perencanaan Perpustakaan, dan Nasional Ri, "Hak masyarakat terhadap layanan Perpustakaan," 2019, 24.

<sup>23</sup> Ayu Rizqi Ilmi , "Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Demak Dengan Mitra Kerja Perpuseru (Studi Kasus: Perpustakaan Desa Kenanga, Perpustakaan Desa Melati dan Perpustakaan Desa Nusa Indah )," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 3 (2019): 131 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23140>.

4. Mendukung segala bentuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Melakukan advokasi .
6. Memonitoring perpustakaan desa yang dibina.<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan perpustakaan umum Dinas dapat berperan dalam pengembangan dan pembinaan layanan perpustakaan desa untuk bertransformasi sebagai layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan menjalankan beberapa strategi di atas.

## C. PERPUSTAKAAN DESA

### 1. Pengertian Perpustakaan Desa

Berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri dan otonomi daerah No.3 Tahun 2001, tujuan perpustakaan desa/kelurahan adalah mencerdaskan, memberdayakan, dan membantu warga di lingkungan desa/kelurahan dengan menyediakan bahan bacaan dan koleksi sebagai salah satu sumber belajar.<sup>25</sup>

Menurut Domai Perpustakaan desa ialah perpustakaan umum yang berada di suatu desa dan difungsikan untuk melayani masyarakat setempat yang menjadi salah satu sarana pendukung dalam hal pendidikan dan informasi masyarakat desa serta menjadi bagian dari peningkatan pembangunan desa.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Rahman, "Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Membaca Malang."

<sup>25</sup> (Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001)

<sup>26</sup> Niken Lastiti Tjahjanulin Domai, "Pelatihan Pengolahan Koleksi Dalam Mendukung Pengembangan Perpustakaan" 02, no. September (2018): hlm 69–83.

Perpustakaan desa menjadi lembaga layanan publik yang berada di desa, yang dikembangkan dari dan untuk masyarakat di mana sebuah perpustakaan tersebut didirikan<sup>27</sup>. Lebih lanjut perpustakaan umum merupakan sebuah gedung atau tempat yang dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara umum mulai dari anak-anak sampai dewasa tanpa membedakan status sosial.<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan perpustakaan desa ialah perpustakaan umum yang berada ditingkat pemerintahan desa, perpustakaan desa merupakan perpanjangan tangan dari perpustakaan umum pemerintahan kota/kabupaten dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, melayani masyarakat secara umum serta menjadi sarana penunjang pendidikan dalam masyarakat di suatu desa.

## **2. Fungsi Perpustakaan Desa**

Salah satu tujuan utama perpustakaan desa adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Perpustakaan desa memiliki potensi sebagai pusat pembelajaran, pertumbuhan komunitas, dan penemuan informasi. Menurut Qalyubi setiap perpustakaan memiliki fungsi

---

<sup>27</sup> I R Nisak, "Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa Sebagai Pusat Belajar Masyarakat (Studi Pada Perpustakaan Mandiri Cendekia Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan ...," 2018, [http://repository.ub.ac.id/166183/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/166183/1/Intani Rokhmatun Nisak.pdf](http://repository.ub.ac.id/166183/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/166183/1/Intani%20Rokhmatun%20Nisak.pdf).

<sup>28</sup> Hartono, *Dasar- Dasar Manajemen Perpustakaan dari Masa ke Masa* (Malang: UIN Maliki Pers, 2015).

pokok yang sama, fungsi tersebut yaitu pendidikan, penelitian, informasi ,dan rekreasi kultural.<sup>29</sup>

a) Penyimpanan

Perpustakaan mengumpulkan bahan untuk disimpan, dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan koleksi. Sebagai bagian dari tugas ini, perpustakaan juga harus memelihara dan menyediakan berbagai bahan pustaka kepada pengguna perpustakaan.

b) Pendidikan

Perpustakaan desa menyediakan dan mengelola berbagai bahan pustaka untuk digunakan sebagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pendidikan dan proses mencari ilmu pengetahuan.

c) Penelitian

Perpustakaan menjadi wadah yang menyediakan bahan bacaan untuk memberikan para peneliti informasi yang relevan bagi penelitian yang dilakukan.<sup>30</sup>

d) Fungsi Rekreasi

Fungsi rekreasi perpustakaan diartikan sebagai penyedia bahan bacaan yang ringan dan menyenangkan, seperti komik, novel, dan lainnya sehingga pengguna perpustakaan dapat membaca dan mengakses informasi yang bersifat menghibur.

e) Fungsi Informasi

---

<sup>29</sup> Ika Krismayani, "Mewujudkan Fungsi Perpustakaan di Daerah," *Anuva* 2, no. 2 (2018): 233, <https://doi.org/10.14710/242>.

<sup>30</sup> Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah* (Yogyakarta, 2016).

Perpustakaan diharuskan memiliki fungsi informasi bagi penggunanya informasi yang dimaksud dalam fungsi perpustakaan ini adalah informasi yang menggambarkan mengenai kebutuhan pengguna, informasi mengenai perpustakaan, sosial, kebudayaan, objek wisata, agama, dan informasi lainnya .

Menurut Kartosedono yang dikutip oleh Asnawi, mengatakan bahwa fungsi perpustakaan desa adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh dan mengumpulkan serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di perpustakaan secara efektif.
- b. Menyebarluaskan manfaat layanan perpustakaan.
- c. Meningkatkan penggunaa bahan pustaka kepada masyarakat.
- d. Menyediakan perpustakaan desa sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat .
- e. Menyediakan bahan pustaka yang bersifat menghibur bagi pengguna perpustakaan<sup>31</sup> .

Dapat disimpulkan fungsi perpustakaan desa adalah menyediakan sumber informasi, bacaan dan menyediakan layanan bagi masyarakat secara umum baik informasi mengenai kehidupan bersosial, agama, pengetahuan tentang mata pencaharian, ekonomi, pertanian dan sebagainya.

### 3. Tujuan Perpustakaan Desa

Secara umum tujuan penyelenggaraan perpustakaan desa adalah:

- a. Untuk mendukung proses belajar mengajar.

<sup>31</sup> Asnawi, "Perpustakaan Desa sebagai Sumber Layanan Informasi Utama," *Media Pustakawan* 22, no. 3. 2015. hlm 41–42.

- b. Menunjang program pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat.
- c. Menyediakan bahan bacaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang.
- d. Meningkatkan minat baca dalam masyarakat .
- e. Mengadakan kegiatan pelibatan masyarakat dalam menggunakan bahan pustaka sebagai hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu senggang.
- f. Mendidik masyarakat agar ikut melestarikan dan mendayagunakan bahan pustaka yang ada di perpustakaan.<sup>32</sup>

Lebih lanjut Menurut Sutarno Ns yang dikutip oleh Musvitas Sari menyebutkan tujuan perpustakaan desa adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung program wajib belajar bagi masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kegemaran masyarakat untuk senantiasa belajar, peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat .
- c. Memberi hiburan dan menumbuhkan sikap optimis terhadap pembelajaran.
- d. Melengkapi kebutuhan masyarakat akan sumber daya berbagai ilmu pengetahuan dalam segala bidang.
- e. Menyediakan kebutuhan sarana edukasi, rekreasi, penerangan, informasi dan penelitian bagi warga desa<sup>33</sup>.

Dapat disimpulkan tujuan perpustakaan desa ialah mendorong masyarakat agar terampil dalam memanfaatkan bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan

<sup>32</sup> Putra dan Siti Khoiriyah, *Manajemen Perpustakaan Desa*,(Bandar Lampung:Yayasan Petualang Literasi 2019),hlm 23.

<sup>33</sup> Musvita Sari, “Manfaat Perpustakaan Desa Untuk Pendidikan Non Formal Masyarakat Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang” (2019).

sebagai sumber belajar yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan potensi masyarakat disegala bidang.

#### **D. LAYANAN PERPUSTAKAAN DESA BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

##### **1. Pengertian Inklusi Sosial**

Konsep Inklusi sosial muncul dari kata antonimnya yaitu eksklusi sosial yang berarti kondisi di mana suatu kelompok atau individu merasakan keterasingan dan perbedaan dalam masyarakat lainnya. Kelompok atau individu yang merasa tereksklusi cenderung memisahkan diri dari masyarakat umum, perasaan ini muncul disebabkan oleh berbagai faktor seperti warna kulit, fisik, status sosial, dan ekonomi yang berakibatkan masyarakat tersebut kurang bahkan tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan apapun dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Inklusi sosial merupakan prakarsa yang mengutamakan penghargaan dan penguasaan terhadap kehidupan diri sendiri sebagai sumber utama untuk mewujudkan taraf hidup yang ideal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2017. Terlepas dari

---

<sup>34</sup> Reza Mahdi et al., "Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Community Empowerment by the Public Library of Magelang Regency in Realizing Social Inclusion-Based Library Services berbasis a," 2020.

perbedaannya, semua anggota masyarakat memiliki perlindungan dan hak yang sama sebagai warga negara..<sup>35</sup>

Menurut Dekki Umamur Rais inklusi sosial merupakan satu tujuan yang di bawa dalam Undang-Undang Desa, yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan, mendorong kebersamaan masyarakat dalam kemakmuran dan menstimulasi keterlibatan segenap warga desa dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut pada pendefinisiannya, Inklusi sosial dipahami mirip dengan makna pemberdayaan, penegakan HAM, dan partisipasi dalam masyarakat<sup>36</sup>

Inklusi sosial dapat juga dikatakan sebagai konsep yang ada dalam masyarakat di mana masyarakat tersebut mendapatkan sumber daya, peluang dan kesempatan belajar, bekerja dan bersosial dalam masyarakat. Menurut Ozili yang dikutip oleh Neneng Komariah, ada beberapa indikator inklusi sosial yang diidentifikasi dari literatur akademik dan kebijakan, adapun indikator tersebut yaitu:

- a. Keadilan penggunaan sumber daya publik.
- b. Kualitas gender.
- c. Pengembangan SDM.
- d. Perlindungan sosial.
- e. Diskriminasi.
- f. Pelestarian lingkungan.
- g. Pengembangan sosial.

---

<sup>35</sup> Perpusnas, "Peraturan Kepala Perpusnas RI No 21 Tahun 2017" 15, no. 2 (2016): 1-23.

<sup>36</sup> Putra, Gutama, dan Widiyahseno, "Inklusi sosial dalam pembangunan desa."

- h. Teknologi sosial.
- i. Penciptaan ruang rekreasi yang dibutuhkan masyarakat.<sup>37</sup>

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa inklusi sosial adalah inklusi sosial merupakan sebuah pendekatan terbuka yang bertujuan untuk mencegah terjadinya keterasingan sosial dalam masyarakat dan membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk kegiatan apapun tanpa memandang faktor-faktor yang membuat masyarakat cenderung tertutup.

## **2. Pengertian Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial**

Perpustakaan desa memainkan peran penting dalam membina masyarakat yang terinformasi dengan baik, tetapi nilai sejatinya sebagai pusat pertumbuhan dan pemberdayaan lokal tidak diakui secara luas. Perpustakaan masih dipandang hanya sebagai tempat menyimpan buku dan tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, padahal seharusnya dapat menjadi salah satu bagian yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan potensi masyarakat, dan peningkatan taraf hidup, dengan demikian layanan yang ada di perpustakaan harus di ubah, pendekatan yang paling menjanjikan adalah menyediakan layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.

Paul sturgess mendefinisikan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan mempertimbangkan keragaman budaya, kemauan untuk menerima

---

<sup>37</sup> Evi Nursanti Rukmana Neneng Komariah, Encang Saepudin, "Pelayanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Desa Jendela Dunia Kabupaten Kuningan Jawa Barat Neneng Komariah, Encang Saepudin, Evi Nursanti Rukmana" 17, no. 1 (2021).

perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya serta hak asasi manusia.<sup>38</sup>

Menurut Haryanti, Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu inovasi layanan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar sepanjang hayat, tidak hanya sebagai tempat mencari informasi tetapi juga sebagai wadah yang mampu memberdayakan masyarakat sebagai komunitas lokal yang selalu berupaya menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.<sup>39</sup>

Dalam hal layanan perpustakaan, perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang mengutamakan kesejahteraan pemustakanya dengan menyediakan sumber daya untuk belajar kelompok dan diskusi untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka sebagai individu dan sebagai kelompok. Lebih lanjut hadirnya perpustakaan berbasis inklusi sosial juga memperkuat fungsi dari perpustakaan itu sendiri, salah satunya fungsi dalam menyediakan informasi, selain menyediakan informasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga menjadi wadah yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat melakukan berbagai kegiatan dan keterampilan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.<sup>40</sup>

Ada beberapa hal yang harus dilakukan perpustakaan untuk meminimalisir eksklusi atau pengucilan sosial di masyarakat sesuai dengan tujuan layanan

<sup>38</sup> Dian Arya Susanti, "Implementasi Konsep Inklusi Sosial di Perguruan Tinggi; sebuah wacana," *MediaPustakawan* 26, no.3(2019):224 <https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/543>.

<sup>39</sup> Aldo Redho Syam Ayu Wulansari, Lilis Surmayanti, "Danpak Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusisosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," 2021.

<sup>40</sup> Wahyu Deni Prasetyo dan Dian Utami, "Penguatan Perpustakaan Untuk Pembangunan: Sebuah Konsep Transformasi Berbasis Inklusi Sosial," *Jurnal IPI (Ikatan Pustakaw* 5, no. 2 (2020): 293–99, <http://ipi.web.id/jurnal/index.php/jurnalipi/article/view/45>.

perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan hal tersebut berdasarkan pedoman dari *Department for Culture, Media, and Sport (DCMS)* di Inggris sebagai pengagas perpustakaan berbasis inklusi sosial, adapun beberapa hal tersebut yaitu:

1. Inklusi sosial ditetapkan sebagai tujuan utama dalam kebijakan dan layanan perpustakaan.
2. Perpustakaan harus memikirkan layanan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat atau minoritas masyarakat yang tereksklusi.
3. Perpustakaan harus dapat melakukan diskusi antara kelompok masyarakat yang tereksklusi secara terbuka agar dapat menemukan dan mengidentifikasi kebutuhan mereka.
4. Perpustakaan menyediakan koleksi sesuai dengan permintaan, dan memperluas infrastruktur layanan perpustakaan saat ini.
5. Jam buka dan layanan perpustakaan harus fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pemustaka.
6. Perpustakaan menjadi sumber daya dan sarana untuk pembelajaran dan pertumbuhan individu.
7. Perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dengan layanan dan akses TIK secara gratis bagi masyarakat pengguna.
8. Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama ke sumber daya perpustakaan, perpustakaan secara teratur menilai kualitas

layanan yang ditawarkan kepada kelompok yang tereksklusi dan kurang terlayani.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang lebih mengambil pendekatan pelayanan publik dengan menyediakan koleksi, meningkatkan tingkat literasi informasi dan teknologi masyarakat, serta terlibat dalam kegiatan yang mendorong potensi masyarakat pedesaan dan sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **3. Tujuan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

Tujuan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menurut Suharyanto Malawa yang dikutip oleh Khairunissa, adalah :

- a. Memperkuat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
- b. Memperkuat fungsi serta peran perpustakaan dalam masyarakat agar perpustakaan bukan hanya dianggap sebagai tempat penyimpanan buku.
- c. Meningkatkan literasi informasi dan pengetahuan berbasis TIK.<sup>42</sup>

Perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan mendorong dan mendukung masyarakat saling memberdayakan satu sama lain sehingga tidak terjadi

<sup>41</sup> Rindi Antiwi, "Stratgei Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemngelolaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial" (Universitas Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id>.

<sup>42</sup> Khairunisa, "Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat ( Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi)."

keterasingan sosial dan memunculkan rasa saling terbuka serta menghargai satu sama lainnya.<sup>43</sup>

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memiliki layanan proaktif yang bertujuan menjadi perpustakaan yang mendukung dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, selain itu layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial juga bertujuan membina masyarakat dalam memenuhi pendidikan literasi dari perpustakaan<sup>44</sup>.

Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan dengan layanan yang bertujuan untuk melayani masyarakat secara terbuka baik dalam mengembangkan potensi masyarakat maupun menyediakan layanan berbasis TIK serta melayani masyarakat dalam mendapatkan pendidikan literasi.

#### **4. Dasar Hukum Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

Mendukung program *Sustainable Development Goals (SDGs)*, atau Program Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, merupakan fungsi penting dari perpustakaan dengan fokus pada inklusi sosial. Mencakup seruan IFLA bagi semua pemangku kepentingan negara untuk menyertakan perpustakaan di seluruh dunia masuk ke dalam rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Melalui Bappenas dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pemerintah Indonesia

---

<sup>43</sup> Reza Mahdi, "Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial: Apa dan Bagaimana Penerapannya? (Sebuah Kajian Literatur)," *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 15, no. 2 (2020): 201, <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.152.201-215>.

<sup>44</sup> Setiawani, "Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Penelitian di Desa Paya Tumpi baru Aceh Tengah )."

mengambil inisiatif tersebut dan menjadikan perpustakaan sebagai pendukung program prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini didukung oleh perpustakaan yang dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan warga dengan menyediakan akses informasi dan tempat untuk melatih keterampilan mereka<sup>45</sup>.

Indonesia memiliki payung hukum dalam menyebutkan perpustakaan sebagai layanan berbasis masyarakat atau inklusi sosial, yaitu :

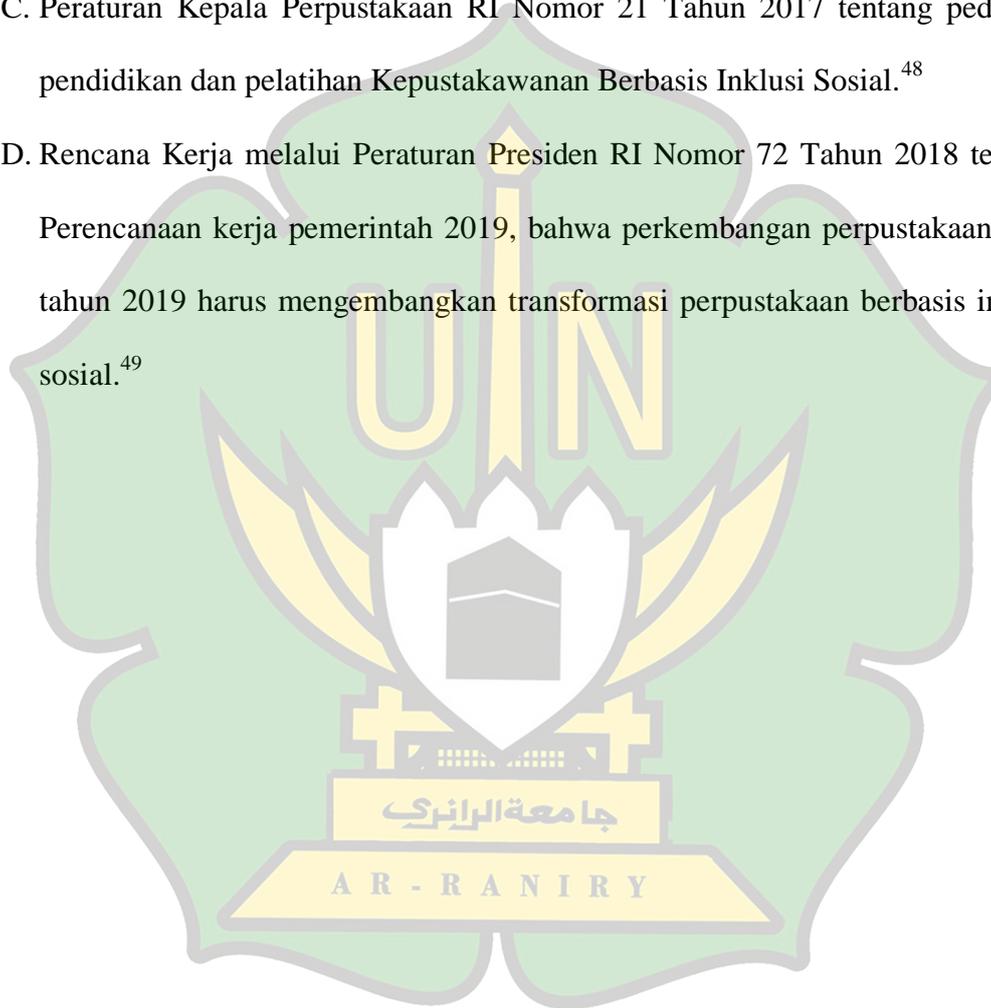
- A. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 5 ayat 1,2,dan 3 yaitu:
- (1) Masyarakat memiliki hak yang sama untuk:
    - a. Memperoleh serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
    - b. Mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
    - c. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
    - d. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
  - (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, datau terbelakang sebagi akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
  - (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, metal ,intelektual,dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dsn keterbatasan masing-masing.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Rahman, "Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Membaca Malang."

<sup>46</sup> Prasetyo dan Utami, "Penguatan Perpustakaan Untuk Pembangunan: Sebuah Konsep Transformasi Berbasis Inklusi Sosial," 294.

- B. Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian ketiga pasal 12 ayat (2) huruf q menjelaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang perpustakaan pada semua jenjang pemerintahan di Indonesia menjadi urusan wajib non dasar.<sup>47</sup>
- C. Peraturan Kepala Perpustakaan RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang pedoman pendidikan dan pelatihan Kepustakawanan Berbasis Inklusi Sosial.<sup>48</sup>
- D. Rencana Kerja melalui Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perencanaan kerja pemerintah 2019, bahwa perkembangan perpustakaan pada tahun 2019 harus mengembangkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.<sup>49</sup>



---

<sup>47</sup> Perpustakaan Nasional RI, “Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Rencana Strategis Tahun 2020-2024,” 2020.

<sup>48</sup> Perpusnas, “Peraturan Kepala Perpustakaan RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Kepustakawanan Berbasis Inklusi Sosial,” 2017, 17, <https://press.perpusnas.go.id>.

<sup>49</sup> “Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019,” n.d., <http://www.bappenas.go.id>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang di mana penelitian tersebut dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan keadaan di lapangan dan bersifat alamiah.<sup>50</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis metode penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya dengan memahami kondisi suatu objek dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam.<sup>51</sup>

Secara umum penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mencapai dan memperoleh gambaran mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan secara alamiah yang tidak dapat disajikan melalui prosedur statistik melainkan dapat disajikan dalam bentuk naratif.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Galang Surya Gumilang, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*, Jurnal Fokus Konseling (2016), <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.

<sup>51</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, NilaCakra Publishing House, Bandung, 2018, [yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf).

<sup>52</sup> Umar Sidiq, Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019, <http://repository.iainponorogo.ac.id>.

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mampu mendeskripsikan dan menyajikan secara rinci mengenai pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, yang terletak di Jl. Commodore Yos Sudarso No.6 Takengon, Aceh Tengah. Peneliti memilih melakukan penelitian di lokasi tersebut karena peneliti melihat sesuai dengan observasi yang dilakukan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah melakukan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2022.

## **C. Fokus Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto fokus penelitian dalam kualitatif disebut juga pengkhususan / pendalaman pokok masalah yang masih bersifat umum<sup>53</sup>. Fokus penelitian yang akan diteliti mengandung arti tersendiri dan kesan mengenai objek yang kelak akan dibahas secara mendalam, penetapan fokus penelitian dapat menjadi pembatas antara studi dan fungsi yang bertujuan untuk memenuhi kriteria informasi yang diperoleh di lapangan.<sup>54</sup> Adapun yang menjadi fokus penelitian

---

<sup>53</sup> Setiawani, *Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Penelitian di Desa Paya Tumpi baru Aceh Tengah)*. (Skripsi:Uin Ar-Raniry), 2022, hlm 26.

<sup>54</sup> Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung, 2017).

dalam penelitian ini adalah pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.

#### **D. Subjek dan Objek**

##### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber informasi yang digunakan dalam proses penelitian baik berupa individu, benda atau organisme yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian, responden merupakan istilah lain dalam menyebutkan subjek penelitian, responden berarti orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan padanya. Lebih lanjut istilah lain subjek penelitian atau responden disebut juga informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian.<sup>55</sup>

Terkait dengan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten”, maka yang menjadi subjek penelitian yaitu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah serta 3 orang pengelola perpustakaan desa yang dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu pengelola perpustakaan desa

---

<sup>55</sup> Khairunisa, “Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat ( Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi).”

Tebes Lues, pengelola perpustakaan desa Kala Kemili dan pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru.

Pengelola perpustakaan desa dijadikan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sebuah metode yang digunakan peneliti dalam memilih sumber data atau subjek yang dianggap sesuai dalam penelitian dengan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau mengenai apa yang diteliti.<sup>56</sup>

Adapun kriteria dalam memilih pengelola perpustakaan desa untuk dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Perpustakaan desa yang dikelola sudah mendapatkan pembinaan untuk dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2019-2022
2. Perpustakaan tersebut masih aktif menjalankan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial sampai dengan sekarang.
3. Perpustakaan Desa tersebut telah melaksanakan kegiatan pelibatan masyarakat minimal 3 kegiatan.

Maka dengan ini peneliti memilih pengelola perpustakaan desa Kala Kemili, desa Paya Tumpi Baru dan desa Tebes Lues sebagai subjek dalam penelitian.

---

<sup>56</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D.

## b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan keadaan dan sifat dari suatu benda, orang, atau sesuatu yang akan diteliti, objek penelitian itu sendiri merupakan sesuatu permasalahan dalam penelitian.<sup>57</sup> Maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang melibatkan dua orang atau lebih secara langsung dan secara fisik yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Ketua Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dan Pengelola perpustakaan desa yang dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur dalam penelitian ini, wawancara semi-terstruktur merupakan jenis wawancara yang memiliki proses dengan rangkaian pertanyaan secara terbuka, wawancara jenis ini memiliki

---

<sup>57</sup> Yuliana Rakhmawati Surokim, *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*, 2016, komunikasi.trunojoyo.ac.id.

<sup>58</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Syria Studies* (Makkasar: Syakir Media Press, 2021).

kemungkinan akan munculnya pertanyaan baru selain dari pertanyaan yang telah diatur dalam daftar pertanyaan wawancara<sup>59</sup>.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil informasi dari catatan sejarah dan catatan tertulis tentang kejadian masa lalu. Hal ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau membaca materi yang relevan dengan penelitian.<sup>60</sup>

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah menghimpun dan menyimpan informasi dalam berbagai format, seperti catatan, foto, surat kabar, majalah, laporan tahunan, agenda, dan lain-lain, yang semuanya berkaitan dengan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

### F. Analisa Data

Analisa data merupakan sebuah proses yang digunakan dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi di lapangan yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan dengan merumuskan data ke dalam kategori yang disarankan, memilih mana yang penting dan membuat penarikan kesimpulan.<sup>61</sup>

1. Reduksi data, reduksi data adalah teknik analisis data yang menghapus informasi atau data yang tidak diperlukan maupun yang diperlukan dalam

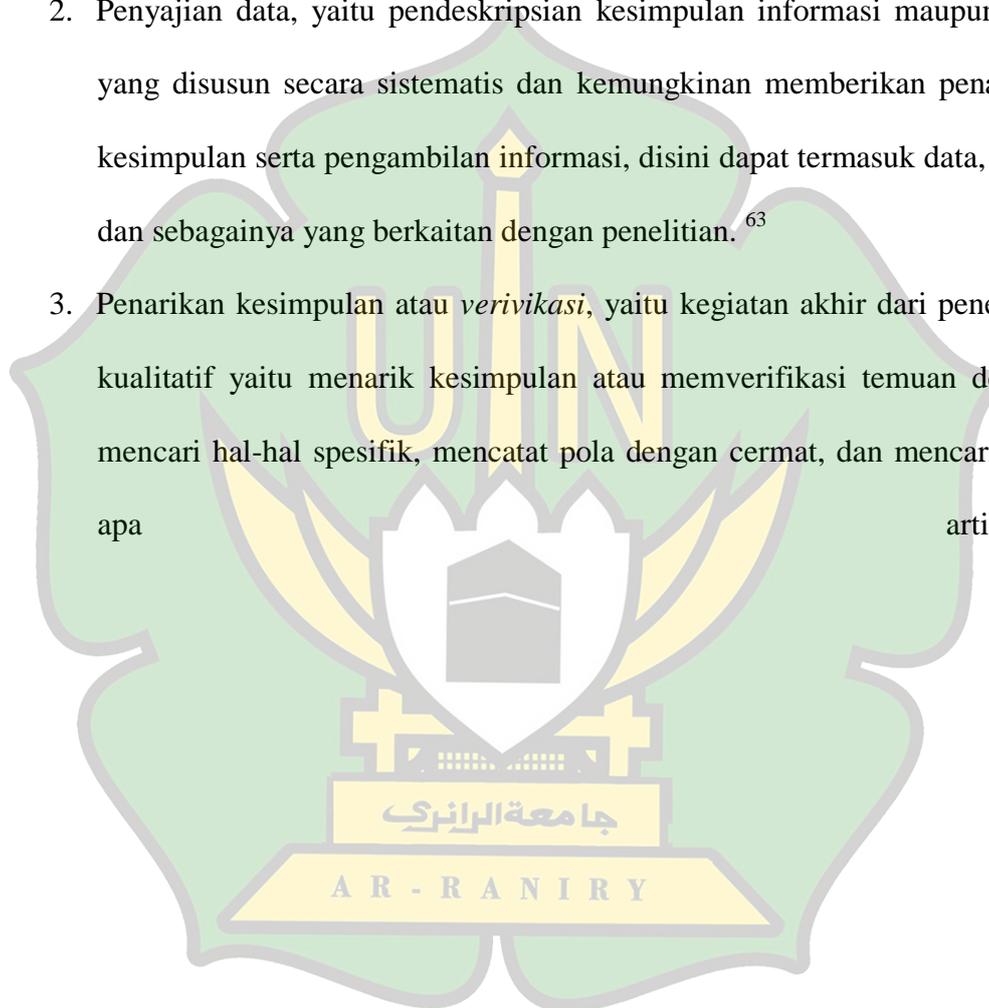
<sup>59</sup> Wilinny Wilinny et al., "Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan," *Jurnal Ilmiah Simantek* 3, no. 1 (2019): 1–6.

<sup>60</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya, 2020, <http://www.academia.edu>.

<sup>61</sup> Setiawani, "Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Penelitian di Desa Paya Tumpi baru Aceh Tengah )."

penelitian, proses ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang ditetapkan untuk menghasilkan gambaran yang jelas sehingga dapat ditarik dan diverifikasi untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.<sup>62</sup>

2. Penyajian data, yaitu pendeskripsian kesimpulan informasi maupun data yang disusun secara sistematis dan kemungkinan memberikan penarikan kesimpulan serta pengambilan informasi, disini dapat termasuk data, table, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>63</sup>
3. Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*, yaitu kegiatan akhir dari penelitian kualitatif yaitu menarik kesimpulan atau memverifikasi temuan dengan mencari hal-hal spesifik, mencatat pola dengan cermat, dan mencari tahu apa artinya.<sup>64</sup>



---

<sup>62</sup> Ubay Gusti Ayu Ningsih, "Tingkat kepuasan pihak bank sumut cabang syariah medan pada," 2021, 1–66, <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12608>.

<sup>63</sup> Nurlizar, "Analisis Pemanfaatan Buku Konvensional Dan E-Book Oleh Mahasiswa Hukum Di Perpustakaan Unsyiah," 2016.

<sup>64</sup> Setiawani, "Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ( Penelitian di Desa Paya Tumpi baru Aceh Tengah )."

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah**

Pada tanggal 15 Oktober 1981, berdasarkan keputusan Bupati selaku Kepala Daerah Takengon Aceh Tengah No. 041/074/1980, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah resmi didirikan . Perpustakaan umum daerah Takengon berdiri sesuai instruksi Mendagri No. 21/1980 yang menyangkut petunjuk pelaksanaan dari pembentukan Perpustakaan umum. Perpustakaan umum daerah Takengon awalnya berlokasi di sebuah ruangan yang terletak di gedung Putro Bungsu Jl. Lebe Kader. Pada tahun 1988 perpustakaan ini dialihkan pengelolaannya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Takengon. UPT Perpustakaan Umum Kabupaten Aceh Tengah didirikan di bekas Perpustakaan Umum Daerah Takengon sesuai dengan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 1988, yang memiliki tugas menghimpun, menyimpan, menata, dan menyediakan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, pengembangan budaya, rekreasi, dan lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan perpustakaan umum Aceh Tengah yang mendapat izin pada tahun 1990. Setelah Menteri Dalam Negeri menyetujui rencana tersebut, Daerah Tingkat II Aceh Tengah memulai pembangunan permanen baru gedung

satu lantai di Jl Yos Sudarso No.10 Takengon pada tanggal 4 Januari 1995 dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).<sup>65</sup>

Tahun 2001 pemerintah daerah Tingkat II Aceh Tengah, Bupati selaku kepala daerah mengambil kebijakan dalam pengalihan perpustakaan umum daerah yang tadinya masih dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah untuk diambil alih dan bergabung dengan Arsip Daerah pada tahun 2002, dan nama sebelumnya berubah menjadi Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun 2008 Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Aceh tengah menjadi salah satu instansi dari 5 Kabupaten di Provinsi Aceh yang mendapatkan bantuan anggaran 1,4 Milyar dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh, anggaran yang didapatkan tersebut digunakan untuk membangun gedung untuk Perpustakaan dan Arsip Daerah Aceh Tengah yang pembangunannya selesai dan diresmikan pada tanggal 24 September 2010.

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Aceh Tengah berubah nama menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah pada bulan Desember 2016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah no.3 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Ir. Abadi selaku Bupati Aceh Tengah, dan pada tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh Bapak Subhan Sahara, S.Sos sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah tanggal 12 Mei 2017 No.821/226/BKPSDM /2017.

---

<sup>65</sup> “Profil Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah,” n.d.

Pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh Bapak Ir. Zikriadi,MM, dan kemudian pada bulan Juni Tahun 2021 dipimpin oleh Drs. Sarwa Jalami, pada tanggal 27 Mei 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh Bapak Drs. Muhammad Syukri, M.Pd dan pada 12 September 2022 hingga saat ini dipimpin oleh Bapak Jefridin Siregar, AP. MM dengan membawahi 45 orang PNS yang terdiri 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 1 Kasubag Umum, 1 Bendahara, 20 Pustakawan, 4 Arsiparis, 17 Staf dan 30 orang tenaga kontrak.<sup>66</sup>

## **2. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah**

Sebagai perpustakaan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah memiliki visi dan misi yang berbeda dengan perpustakaan lainnya, Adapun visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

### **a. Visi**

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perpustakaan dan Penataan Kearsipan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera.

### **b. Misi**

Misi secara umum :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai komitmen dalam menjamin pemerataan, keadilan, dan meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah

---

<sup>66</sup> Profil Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.

melalui mobilisasi sumber daya yang dimiliki khususnya bagi masyarakat yang berada pada daerah-daerah terpencil.

Misi secara spesifik :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan arsip daerah.
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
3. Pelaksanaan pengelolaan bahan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
4. Pelaksanaan pelayanan teknologi perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
5. Pelaksanaan penyelenggaraan deposit, citra daerah, budaya baca, dan khasanah arsip.<sup>67</sup>

### 3. Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah

Total keseluruhan jumlah koleksi bahan Pustaka yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah adalah sejumlah 25.995 judul dan 68.345 dengan komposisi pada table berikut :

No.	Jenis Koleksi	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1.	Non Fiksi	16684	49141
2.	Referensi	242	621
3.	Fiksi	3348	6715
4.	Buku Langka Gayo	206	548
5.	Skripsi	2811	2811

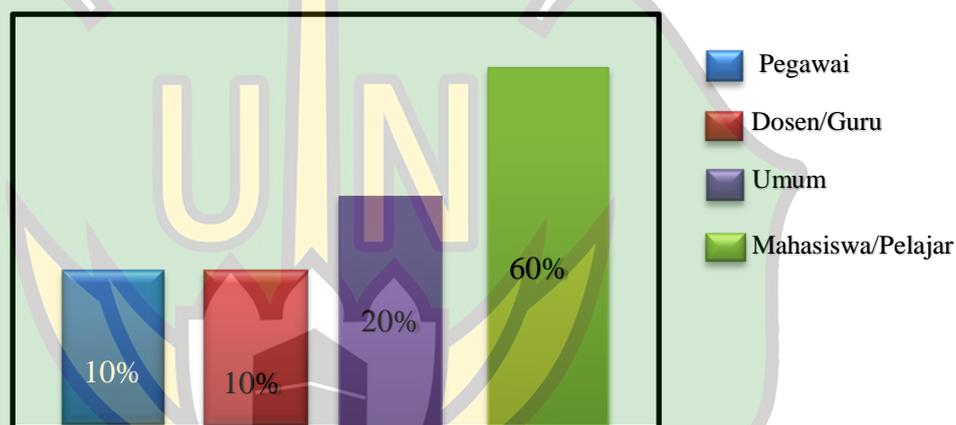
<sup>67</sup> "Profil Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah."

6.	Audio Visual	188	843
----	--------------	-----	-----

Tabel 4.1 Daftar Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022

#### 4. Anggota Perpustakaan

Hingga saat ini, terdapat 1.891 orang yang menjadi anggota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, dan dirinci sebagai berikut:



Tabel 4.2 Komposisi Anggota Perpustakaan Tahun 2022

#### 5. Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah

Sebagai perpustakaan umum tingkat pemerintahan kabupaten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah menyediakan layanan yang berorientasi pada seluruh masyarakat, berikut ini adalah layanan yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah:

- a. Layanan Sirkulasi
- b. Layanan Baca di tempat
- c. Layanan Pembuatan Kartu Anggota
- d. Layanan Referensi

- e. Layanan Bimbingan Teknis Perpustakaan
- f. Layanan Perpustakaan Keliling
- g. Layanan Pinjam Pakai Antar Perpustakaan
- h. Layanan Anak
- i. Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

## 6. Program Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah merupakan perpustakaan umum daerah yang sudah melakukan penetapan sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2018. Pengimplementasian program ini juga sudah dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan perpustakaan bersama masyarakat, hal ini juga termasuk pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, kegiatan tersebut dapat dilihat di halaman *Facebook* dan *Instagram* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.

Kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diamanahkan oleh Perpustakaan Nasional, dalam hal ini menjadi tupoksi dari bidang pembinaan dan pengembangan bahan Pustaka, sebagai kepala seksi Ibu Sukmawati, SH tahun 2018-2020. Pada Tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah menerima penghargaan sebagai perpustakaan kabupaten/kota terbaik dalam implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Perpustakaan Nasional. Adapun program yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adalah

a. Pengembangan Kreativitas Masyarakat

Pengembangan kreativitas masyarakat merupakan salah satu kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Aceh Tengah, kegiatan yang dilakukan yaitu berupa pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas masyarakat, pelatihan yang dilakukan yaitu dengan cara mengolah dan membuat produk bernilai jual, hal ini diharapkan dapat menunjang potensi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat serta menambah wawasan bagi pengelola perpustakaan desa sehingga dapat melakukan pelatihan-pelatihan lainnya di perpustakaan desa masing-masing. Peserta dalam pelatihan yang dilakukan yaitu pengelola perpustakaan desa, perangkat desa, dan beberapa orang masyarakat dari desa tersebut.

Adapun pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

1. Pelatihan Pembuatan Kripik Pisang Berbagai Rasa.
2. Pelatihan Packaging Bubuk Kopi.
3. Pelatihan Pembuatan Kentang Ulir Frozen.<sup>68</sup>

b. Peningkatan Literasi Berbasis Tik

Kegiatan selanjutnya yang mendukung program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah peningkatan literasi berbasis Tik, kegiatan ini merupakan pelatihan mengenai penambahan wawasan teknologi bagi pengelola perpustakaan desa dan perangkat desa.

---

<sup>68</sup>Sumber: Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.

Peningkatan literasi berbasis tik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola perpustakaan dalam dunia IT, Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Pelatihan Dasar Komputer.
2. Pelatihan Promosi Produk melalui Media Sosial.<sup>69</sup>

Kegiatan di atas merupakan bentuk pengimplementasian yang telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan fasilitas baik berupa tempat, pemateri, alat, bahan-bahan maupun konsumsi.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Bidang Pengembangan dan Pembinaan bahan Pustaka, dan 3 orang pengelola perpustakaan desa yang dikembangkan dan dibina menjadi perpustakaan desa dengan layanan berbasis inklusi sosial.

Kepala Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Jeffridin Siregar, mengenai pengembangan perpustakaan desa berbasis

---

<sup>69</sup>Sumber: Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.

inklusi sosial beliau menjelaskan bahwa belum lama menjabat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dan mengatakan:

*“ Dari laporan yang saya terima Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah sebagai perpustakaan umu sudah mengimplementasikan Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan saat ini mengembangkan perpustakaan desa yang ada di Aceh Tengah menjadi perpustakaan dengan layanan berbasis inklusi sosial juga, ada 10 perpustakaan desa ya yang dikembangkan, dan juga ada tim dari bidang pengembangan dan pembinaan bahan Pustaka yang merealisasikan program tersebut, ada ibu Sukmawati dari sana sebagai PIC yang ditunjuk langsung, mengenai anggaran untuk program ini sudah dianggarkan hingga tahun 2023”.<sup>70</sup>*

Lebih lanjut, Ibu Sukmawati, staff dari Bidang Pengembangan dan Pembinaan bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, beliau sekaligus PIC (Penanggung jawab) program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Aceh Tengah, Menegaskan bahwa:

*“Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mulai mengimplementasikan program perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PERPUSNAS sejak Tahun 2018, dan pada tahun 2019 kami merangkul perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah untuk dikembangkan dan dibina menjadi perpustakaan desa yang*

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Jefridin Siregar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Pada 27 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

*memiliki layanan berbasis inklusi sosial. Artinya dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah sebagai perpustakaan pembina dan fasilitator yang bertujuan untuk mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Perpustakaan desa yang kami bina ada 10 perpustakaan desa, itu dimulai sejak tahun 2019 awalnya hanya 5 perpustakaan desa saja, namun seiring berjalannya waktu hingga tahun 2022 ini sudah ada 10 perpustakaan desa di Kabupaten Aceh Tengah yang kami kembangkan menjadi perpustakaan dengan layanan berbasis inklusi sosial, berbasis inklusi sosial itu kan singkatnya berorientasi pada masyarakat ya jadi perpustakaan desa kami beri pembinaan dan melakukan segala kegiatan yang ada di perpustakaan dengan melibatkan masyarakat untuk saat ini 10 perpustakaan tersebut terpilih menjadi perpustakaan penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari PERPUSNAS”.*<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara diatas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah saat ini membina 10 perpustakaan desa untuk dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dengan proses pembinaan dan pengembangan yang dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perpustakaan. Pengembangan yang dilakukan dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, pengembangan ini dilakukan oleh bidang pengembangan dan pembinaan bahan pustaka Dinas Perpustakaan dan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, sebagai PIC (penanggung jawab) Ibu Sukmawati.

**1) Pengembangan Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial  
Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah**

Pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat fungsi perpustakaan yang ada di desa melalui layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang nantinya diharapkan masyarakat lebih memanfaatkan perpustakaan sesuai dengan fungsinya serta dapat mencari informasi yang masyarakat butuhkan untuk menunjang kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Adapun pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dan strategi sebagai berikut:

a. Pemberian Fasilitas kepada perpustakaan desa

Pemberian fasilitas ini dilakukan pada perpustakaan desa penerima manfaat dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, fasilitas yang diberikan bertujuan untuk mendukung pengimplemtasian layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, fasilitas yang diberikan berupa komputer, rak buku, koleksi, TV, wi-fi dan server.

Mengenai pemberian fasilitas Ibu Sukmawati, staff dari Bidang Pengembangan dan Pembinaan bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, beliau sekaligus PIC (Penanggung jawab) program

transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Aceh Tengah mengatakan:

*“Pengembangan perpustakaan desa dengan layanan berbasis inklusi sosial ini sebelumnya kita lakukan dengan memberikan fasilitas, fasilitas yang diberikan ini merupakan fasilitas untuk perpustakaan desa penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari PERPUSNAS, sebagai perpanjangan tangan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sangat mendukung sekali program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diamanatkan oleh PERPUSNAS, jadi kita terus melakukan yang terbaik begitu juga dengan perpustakaan desa yang kita kembangkan salah satunya ya pemberian fasilitas untuk mendukung kegiatan yang akan dilakukan perpustakaan desa tersebut, fasilitasnya berupa komputer, koleksi buku, rak buku, wi-fi dan server”.*<sup>72</sup>

Mengenai pemberian fasilitas, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mengatakan:

*“Pemberian fasilitas yang dilakukan merupakan amanah dari Perpustakaan, perpustakaan desa yang dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial mendapatkan fasilitas sebagai penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, fasilitas tersebut berupa komputer, wifi, buku dan rak buku”.*<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Jefridin Siregar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Pada 27 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, bapak Jefridin Siregar dan ibu Sukmawati, SH staff dari Bidang pengembangan dan pembinaan bahan Pustaka, dalam pemberian beberapa fasilitas tersebut PERPUSNAS melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2019-2021 memberikan fasilitas kepada 10 perpustakaan desa yang dikembangkan dan saat ini menjadi perpustakaan desa yang menerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Adapun perpustakaan desa tersebut sebagai berikut:

No	Nama Perpustakaan	Tahun Pemberian	Rincian Fasilitas
1	Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru	2019	2 Buah Komputer, 1 buah server, 1 buah TV, 5 Rak Buku dan 1000 eks Buku.
2	Perpustakaan Desa Tebes Lues	2019	2 Buah Komputer, 1 buah server, 1 buah TV, 5 Rak Buku dan 1000 eks Buku.
3	Perpustakaan Desa Blang Mancung	2019	2 Buah Komputer, 1 buah server, 1 buah TV, 5 Rak Buku dan 1000 eks Buku.
4	Perpustakaan Desa Kung	2019	2 Buah Komputer, 1 buah server, 1 buah TV, 5 Rak Buku dan 1000 eks Buku.
5	Perpustakaan Desa Jagong Jeget	2019	2 buah Komputer, 1 buah server, 1 buah TV, 5 Rak Buku, dan 1000 eks Buku.
6	Perpustakaan Desa Mongal	2021	2 Buah Komputer, 1 buah TV, 1 buah wi-fi, 1 buah printer, 3 buah rak buku
7	Perpustakaan Desa Kemili	2021	2 buah Komputer, 1 buah TV, 1 buah printer, 1 buah wi-fi, 3 buah rak buku

8	Perpustakaan Desa Kelitu	2021	2 buah Komputer, 1 buah TV, 1 buah printer, 1 buah wi-fi, 3 buah rak buku
9	Perpustakaan Desa Arul Latong	2021	2 buah Komputer, 1 buah TV, 1 buah printer, 1 buah wi-fi, 3 buah rak buku
10	Perpustakaan Desa Kala Kemili	2021	2 buah Komputer, 1 buah TV, 1 buah printer, 1 buah wi-fi, 3 buah rak buku

Tabel 4.2 Daftar Perpustakaan Penerima Fasilitas (Sumber Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka)

Peneliti melakukan konfirmasi pada pengelola perpustakaan desa Kala Kemili, Ibu Saumi Mahara sebagai penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang disalurkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, beliau mengatakan:

*“ Perpustakaan desa Kala Kemili menjadi salah satu perpustakaan desa yang dibina dan dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial sejak tahun 2020, tahun 2020 itu kan pada masa covid-19 jadi pada saat itu banyak anak-anak yang diliburkan sekolahnya dan berkegiatan di perpustakaan desa. Pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan kepada kami fasilitas untuk mendukung kegiatan yang kami lakukan, fasilitas yang dikasih ada komputer 1 buah, Televisi 1 buah, Wi-fi, Rak buku, terus ada juga bukunya sekitar 1000 eksamplar, komputer yang dikasih itu biasanya kami pakai untuk anak-anak buat tugas, kami ada juga*

*buka les komputer, kadang-kadang kami nonton bareng menggunakan Televisi yang dikasih”.*<sup>74</sup>

Serupa dengan pengelola perpustakaan desa Kala Kemili, pengelola perpustakaan desa Tebes Lues dan pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi baru mengenai pemberian fasilitas masing-masing mengatakan:

*“ perpustakaan desa Tebes Lues dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial sejak tahun 2019, pada tahun itu juga kami mendapatkan fasilitas berupa komputer, server, buku, rak buku, dan TV dari perpustnas yang yang disalurkan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, pada saat itu kami menjadi salah satu perpustakaan desa penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial”*<sup>75</sup>

*“ Perpustakaan desa paya tumpi mendapatkan fasilitas sebagai salah satu perpustakaan desa penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Perpustnas, fasilitas diberikan langsung oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019, fasilitas yang diberikan berupa 2 buah computer, 1 TV, 5 Rak Buku, 1 buah server, terus ada beberapa koleksi juga”*<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili, Pada 23 September 2022, Pukul 16.00 WIB

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues Pada 25 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Ramlana Safitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Pada 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas dapat kita ketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah melakukan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dengan menyalurkan beberapa fasilitas yang diberikan PERPUSNAS yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang berorientasi pada masyarakat dengan adanya fasilitas tersebut dapat memenuhi salah satu tujuan dari perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu meningkatkan literasi informasi dan pengetahuan berbasis TIK.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah selama 3 bulan pada awal tahun. Sosialisasi dilakukan oleh tim bidang pembinaan dan pengembangan bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dibawah tanggung jawab Kabid dan Kepala Dinas.

Mengenai hal ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Jeffridin Siregar mengatakan:

*“Dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang dari bidang pengembangan dan pembinaan bahan Pustaka, salah satunya yaitu ibu Sukmawati, SH sebagai Pic atau penanggung jawab program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sejauh ini yang saya ketahui mereka melakukan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial salah satu kegiatannya yaitu dengan*

*sosialisasi ya, sosialisasi yang mereka lakukan biasanya di awal tahun selama 3 bulan yaitu Februari, Maret, April itu mereka turun langsung ke perpustakaan-perpustakaan desanya kemudian dilanjutkan dengan realisasi apa yang sudah disosialisasikan sebelumnya”<sup>77</sup>*

Lebih lanjut disampaikan Ibu Sukmawati, staff dari Bidang Pengembangan dan Pembinaan bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, beliau sekaligus PIC (Penanggung jawab) program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan:

*“Sosialisasi merupakan salah satu cara yang kami lakukan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, sosialisasi yang kami lakukan biasanya dilaksanakan pada awal tahun selama 3 bulan, dan bulan berikutnya melakukan kegiatan lain, sosialisasi dilakukan di Dinas maupun kami turun langsung ke perpustakaan desa”<sup>78</sup>.*

Mengenai sosialisasi penulis mengkonfirmasi pada 3 pengelola perpustakaan desa.

Pengelola perpustakaan desa Tebes Lues, Ibu Novita Rahmayanti, beliau mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi sebagai bentuk pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ada dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, biasanya sosialisasi yang mereka lakukan secara langsung ke*

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Jefridin Siregar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Pada 27 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

*perpustakaan desa tapi kemarin kami ada juga datang ke Dinas untuk mengikuti sosialisasi mengenai perpustakaan berbasis inklusi sosial”.*<sup>79</sup>

Pengelola perpustakaan desa Kala Kemili Ibu Saumi Mahara, beliau mengatakan:

*“ kegiatan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas selanjutnya ada sosialisasi, materi sosialisasinya seputar perpustakaan berbasis inklusi sosial, penerapan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan itu bagaimana dan pemberian dukungan dan lain-lain, sosialisasinya dilaksanakan di perpustakaan desa masing-masing dan juga ada yang di Dinas ”.*<sup>80</sup>

Pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru, Ibu Ramlana Safitri, mengenai sosialisasi beliau mengatakan:

*“Kegiatan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial itu ada sosialisasi, sosialisasinya ada yang dilakukan di perpustakaan desa secara langsung dan ada juga yang dilakukan di Dinas, untuk materi yang di sosialisasikan seputaran layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial”.*<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas pengembangan dan pembinaan bahan Pustaka melakukan sosialisasi yang dilakukan pada 10 perpustakaan desa yang

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues Pada 25 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili, Pada 23 September 2022, Pukul 16.00 WIB

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Ramlana Safitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Pada 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

dikembangkan secara bertahap, Adapun materi sosialisasi yang disampaikan yaitu meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
  - b. Peningkatan mekanisme kegiatan pelibatan masyarakat
  - c. Pemberian dukungan dan membangun ko
  - d. komitmen stakeholder untuk layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- c. Bimtek Pengelola Perpustakaan

Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan desa (Bimtek) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu kegiatan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, bimbingan teknis yang dilakukan meliputi kegiatan pelatihan pengelola perpustakaan desa di Kabupaten Aceh Tengah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Jefridin Siregar mengenai bimtek pengelola perpustakaan mengatakan:

*“Mengenai bimbingan teknis pengelola perpustakaan desa berdasarkan laporan dilakukan di Aula Dinas Perpustakaan dan Aula gedung C kantor Bupati Aceh Tengah, dan materi bimbingan teknis sudah pasti mengenai pengelolaan perpustakaan, layanan dan lain-lain para pengelola perpustakaan desa diberikan ilmu mengenai dan bagaimana mengelola perpustakaan supaya efektif”<sup>82</sup>*

Sebagai PIC (Penanggung Jawab) program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Ibu Sukmawati, mengatakan:

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Jefridin Siregar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Pada 27 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

*“ kami juga melakukan bimbingan teknis sebagai salah satu kegiatan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, bimbingan teknis ini biasanya kami lakukan di aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kadang juga kami buat di aula gedung C Kantor Bupati Aceh Tengah, bimtek yang lakukan biasanya berhubungan dengan bagaimana pengolahan koleksi perpustakaan, layanan pengguna, kegiatan pelibatan masyarakat, bimbingan jadwal buka tutup perpustakaan dan lain-lain. Bimbingan teknis ini dilakukan bagi pengelola perpustakaan desa secara umum yang ada di Kabupaten Aceh Tengah”<sup>83</sup>*

Lebih lanjut mengenai bimbingan teknis pengelola perpustakaan desa. Tebes Lues memaparkan bahwa:

*“pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dilakukan melalui bimbingan teknis pengelola perpustakaan desa secara umum, di mana dalam bimbingan teknis ini kami sebagai pengelola dibekali bagaimana cara mengolah koleksi dengan baik, mengoptimalkan layanan perpustakaan dengan baik dan masih banyak lagi”<sup>84</sup>*

Berikut keterangan dari pengelola perpustakaan desa Kala Kemili, beliau mengatakan:

*“Pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dilakukan juga melalui bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan desa*

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues Pada 25 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

*secara umum di Kabupaten Aceh Tengah, Kami sebagai pengelola perpustakaan desa Kala Kemili ada mengikuti bimbingan teknis ini 3 kali dan dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah”.*<sup>85</sup>

Mengenai bimbingan teknis pengelola perpustakaan, Ibu Ramlana Safitri, pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru mengatakan:

*“ Bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan desa yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, iya benar ada dilakukan bimbingan teknis bagi kami para pengelola perpustakaan tujuannya supaya pengelola perpustakaan dapat menambah wawasan dalam mengelola perpustakaan dengan lebih baik”*<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas salah satu kegiatan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adalah melaksanakan bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan, bimbingan teknis dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui bidang pengembangan dan pembinaan bahan Pustaka membentuk panitia kegiatan bimbingan teknis.
2. Pemberian arahan dan tugas panitia dalam hal ini meliputi pemilihan tema bimbingan teknis, pemilihan materi, lokasi dan waktu.

---

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili, Pada 23 September 2022, Pukul 16.00 WIB

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Ramlana Safitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Pada 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

3. Panitia mengundang peserta dalam hal ini panitia mengundang peserta melalui wa/sms.
4. Pelaksanaan kegiatan .
5. Menyusun laporan kegiatan.

Adapun materi bimbingan teknis yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada pengelola perpustakaan desa meliputi:

- ✓ Jadwal buka tutup perpustakaan
- ✓ Pengolahan koleksi perpustakaan dalam hal ini meliputi inventarisasi, klasifikasi, penataan di rak, preservasi atau pemeliharaan koleksi.
- ✓ Minat baca masyarakat.
- ✓ Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

d. Bimtek Revitalisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Bimbingan teknis revitalisasi dilakukan kepada pengelola perpustakaan desa yang mengikuti program revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, jadi bimbingan teknis ini tidak semua pengelola perpustakaan desa di Aceh Tengah mengikuti karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

Mengenai hal ini Ibu Sukmawati, staff dari Bidang Pengembangan dan Pembinaan bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, beliau sekaligus PIC (Penanggung jawab) program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Aceh Tengah mengatakan:

*“ Selain bimbingan teknis pengelola perpustakaan secara umum, kami juga melakukan bimtek revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi 10 perpustakaan yang dibina dan dikembangkan oleh dinas perpustakaan dan*

*kearsipan kabupaten aceh tengah secara khusus, artinya 10 perpustakaan desa tersebut merupakan perpustakaan yang menjadi penerima manfaat TPBIS dari Perpunas dan sudah memenuhi kriteria sebagai perpustakaan yang dapat dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, bimbingan teknis ini dilakukan sebagai penguatan SDM perpustakaan dalam mengelola perpustakaan desa berbasis inklusi sosial<sup>87</sup>”.*

Lebih lanjut mengenai bimbingan teknis revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pengelola perpustakaan desa Tebes Lues Ibu Novita Rahmayanti, beliau mengatakan:

*“ Selanjutnya dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas itu ada kegiatan bimtek revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, bimtek ini kalau kami tidak salah sifatnya khusus di mana sebelumnya kegiatan yang dilakukan ada bimtek pengelola perpustakaan secara umum tapi yang revitalisasi ini hanya di ikuti 10 perpustakaan desa yang memenuhi kriteria sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial, dalam bimtek revitalisasi ini pengelola perpustakaan diberikan arahan mengenai layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, pengimplementasiannya pada masyarakat dan gambaran kegiatan yang dapat dilakukan berikutnya”<sup>88</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Saumi Mahara, pengelola perpustakaan desa Kala Kemili beliau mengatakan:

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues Pada 25 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

*“ Bimbingan revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ada dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga, kami pengelola perpustakaan desa di undang untuk mengikuti bimbingan teknis ini, bimbingan teknis revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan hanya untuk perpustakaan yang dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, sejak saya menjadi pengelola perpustakaan di sini sudah 2 kali mengikuti bimtek revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial”<sup>89</sup>*

Mengenai bimtek revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi baru, Ibu Ramlana Safitri, mengatakan:

*“Selain bimtek pengelola perpustakaan secara umum, ada juga bimtek revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilakukan Dinas dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, dalam bimbingan teknis ini ada beberapa materi yang disampaikan dan itu semua terkait dengan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial”<sup>90</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui Bimbingan Teknis Revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan Langkah dalam pengembangan yang dilakukan Dinas bagi 10 perpustakaan yang sudah memenuhi kriteria sebagai perpustakaan yang dapat dikembangkan, Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili, Pada 23 September 2022, Pukul 16.00 WIB

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Ramlana Safitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Pada 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

1. Menyatakan komitmen bersedia mengikuti program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari kepala desa
2. Perpustakaan memiliki pengelola minimal 1 orang maksimal 5 orang.
3. Perpustakaan mempunyai bangunan sendiri.
4. Perpustakaan memiliki sambungan listrik dan lokasi tekoneksi jaringan internet.
5. Perpustakaan memiliki sarana dan prasarana lengkap.

Bimbingan teknis ini biasanya dilakukan secara bertahap di mana terlebih dahulu tim dan PIC dari Kabupaten mengikuti di provinsi dan yang diselenggarakan oleh pusat, selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuat bimtek yang sasarannya adalah pengelola perpustakaan penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam mengelola perpustakaan berbasis inklusi sosial, kegiatan atau pelatihan seperti apa yang harus dilakukan, dan bagaimana pengimplementasian program tersebut dalam masyarakat.

e. Advokasi

Advokasi dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dengan pihak yang berkepentingan dalam menjalankan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, dan biasanya dilakukan pihak dinas oleh pemerintahan desa di mana yaitu Kepala Desa dan Perangkat desa. Mengenai advokasi ini Ibu Sukmawati, mengatakan:

*“ Advokasi yang kita lakukan biasanya sama pihak pemerintahan desa, seperti kepala desanya kita beri arahan mengenai perpustakaan desa dan kita kasih tau juga kalau perpustakaan desanya sudah kita bina dan kita kembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, layanan inklusi sosial di perpustakaan desa itu harus didukung, segala bentuk kegiatannya juga, biasanya kalau advokasi itu kita lakukan setidaknya dua kali dalam setahun per perpustakaan desa ya selain itu kita juga melakukan advokasi dengan bapak bupati selaku kepala daerah, Bappeda dan lainnya, artinya advokasi ini dilakukan untuk memberi tahu seperti apa perpustakaan berbasis inklusi sosial itu tujuannya ya supaya anggaran kita tetap ada ”<sup>91</sup>.*

Lebih lanjut mengenai advokasi, pengelola perpustakaan desa Kala Kemili, Ibu Saumi Mahara, mengatakan:

*“ Dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada melakukan advokasi dengan pemerintahan desa Kala Kemili, advokasi yang dilakukan saya rasa bertujuan untuk memberikan pengarahannya kepada pemerintahan desa bahwa perpustakaan desa Kala Kemili sedang dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas ”<sup>92</sup>*

Pengelola perpustakaan desa Tebes Lues, Ibu Novita Rahmayanti, mengenai advokasi mengatakan:

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>92</sup> Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili, Pada 23 September 2022, Pukul 16.00 WIB

*“ Salah satu kegiatan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas yaitu melalui advokasi, di mana advokasi ini dilakukan dengan pemangku jabatan di desa yaitu reje dan aparatur desanya. Dinas itu melakukan advokasi dalam setahun itu 2 kali di awal tahun dan akhir, di akhir tahun kan ada musermbang desa jadi sebelum musermbang dilakukan advokasi sebagai pengarahan dan pengingat bahwa di dana desa ada anggaran untuk perpustakaan ”<sup>93</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru, Ibu Ramlana Safitri, beliau mengatakan:

*“ Pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan memberikan beberapa layanan kepada kami, salah satunya yaitu advokasi yang dilakukan dengan pemerintahan desa Paya Tumpi Baru dengan tujuan memberikan arahan mengenai apa-apa saja yang terkait dengan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini termasuk juga advokasi mengenai anggaran ”<sup>94</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, advokasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan baik dari kepala daerah maupun kepala desa di mana layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dikembangkan.

#### f. Mentoring/Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk memberikan bimbingan, saran tentang

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues Pada 25 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu Ramlana Safitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Pada 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

hal yang mendukung pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Pendampingan perlu dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan pada perpustakaan desa yang dikembangkan dan dibina agar perpustakaan dapat terus menjadi wadah yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Mengenai hal ini Ibu Sukmawati, staff dari Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, beliau sekaligus Pic (Penanggung jawab) program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Aceh Tengah mengatakan:

*“Pengembangan yang kami lakukan juga dengan melaksanakan kegiatan mentoring/pendampingan bagi perpustakaan desa, mentoring ini biasa dilakukan saat perpustakaan desa melakukan kegiatan pelibatan masyarakat misalnya seperti perpustakaan desa Tebes Lues mereka membuat kegiatan membuat minuman, jadi kami turun langsung pas acara dibuat dan melakukan pendampingan setelah itu memberikan saran dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian misalnya ada perpustakaan desa yang ingin membuat kegiatan namun terkendala di pemateri jadi kami menyediakan fasilitas untuk memenuhi kendala tersebut seperti mencari pemateri yang cocok mengisi acara tersebut, itu pemateri bisa jadi dari Dinas atau lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan kegiatan tersebut”.*<sup>95</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh pengelola perpustakaan desa Kala Kemili, Ibu Saumi Mahara, beliau mengatakan:

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

*“ Dari Dinas melakukan mentoring/pendampingan kalau kami buat kegiatan dek, jadi ada beberapa orang dari dinas turun langsung ke perpustakaan ikut kebersamai dan melakukan pendampingan kegiatan yang kami buat, terus kalau minsalnya kami buat kegiatan pematerinya tidak ada kami biasanya minta saran sama dinas, seperti kemarin itu kami buat pelatihan membuat konektor masker terus pematerinya ngga ada jadi dinas mencari pematerinya dek”.<sup>96</sup>*

Pengelola perpustakaan desa Tebes Lues, mengenai mentoring mengatakan:

*“ selain beberapa kegiatan tadi, ada juga mentoring atau pendampingan yang dilakukan oleh Dinas, biasanya pendampingan ini dilakukan pada saat kami membuat acara seperti kegiatan pelatihan dan lain-lain, jadi ada beberapa orang dari Dinas ikut kebersamai kegiatan kami selanjutya mereka akan memberikan arahan dan evaluasi untuk kegiatan yang kami lakukan itu”.<sup>97</sup>*

Lebih lanjut, pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru Ibu Ramlana Safitri, beliau mengatakan:

*“ Proses pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dilakukan juga melalui kegiatan pendampingan/mentoring, disini Dinas sebagai instansi induk yang terus mendampingi dan melakukan mentoring terhadap kegiatan yang kami buat, sebagai pengelola perpustakaan desa kami*

---

<sup>96</sup> Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili, Pada 23 September 2022, Pukul 16.00 WIB

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues Pada 25 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

*sangat terbantu dengan adanya pendampingan ini, kami merasa dirangkul untuk mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial”.*<sup>98</sup>

Dapat kita ketahui dari hasil wawancara dengan informan diatas bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah melakukan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dengan melakukan mentoring/pendampingan yang bertujuan untuk memberdayakan perpustakaan desa yang dikembangkan serta membangun semangat para pengelola perpustakaan desa dan masyarakat untuk terus memanfaatkan perpustakaan.

g. *Peer Learning Meeting (PLM)*

Peer Learning Meeting merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, dalam kegiatan ini para pengelola perpustakaan desa difasilitasi untuk proses saling belajar dan berbagi pengalaman mengenai layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang sudah mereka lakukan.

Dalam hal ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Jefridin Siregar, beliau mengatakan:

*“Salah satu kegiatan dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan menurut laporan dari PIC itu ada PLM ( Peer Learning Meeting) ,adapun tujuan dari PLM ini ialah membuka ruang untuk para pengelola perpustakaan dan pihak Dinas untuk berdiskusi*

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ibu Ramlana Safitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Pada 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

*mengenai perkembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang sudah dilakukan “<sup>99</sup>*

Lebih lanjut Ibu Sukmawati, staff bidang pengembangan dan pembinaan bahan pustaka sekaligus pic (penanggung jawab) transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, mengenai *Peer Learning Meeting* beliau mengatakan:

*“ Pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang kami lakukan itu melalui Peer Learning Meeting, PLM ini ada yang dari Nasional, Provinsi terus Kabupaten yang seperti kita buat, kalau kabupaten kita undang para pengelola perpustakaan desanya jadi kita buat seperti diskusi nanti disitu saling sharing, belajar bersama, tanya jawab dan sebagainya. Terus kalau Nasional dan Provinsi biasanya PLM dilakukan via zoom itu pengelola perpustakaan desa bisa melakukan di perpustakaan sendiri namun kita sediakan juga tempat dan fasilitas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pengelola perpustakaan desa yang mau melakukan PLM disini ”<sup>100</sup>*

Mengenai *Peer Learning Meeting*, pengelola perpustakaan Desa Kala Kemili, Ibu Saumi Mahara, mengatakan:

*“Kami mengikuti Peer Learning Meeting dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, peer learning meeting di Kabupaten dilaksanakan langsung di Dinas, kalau peer learning meeting Provinsi dan*

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Jefridin Siregar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Pada 27 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

*Nasional itu melalui zoom selama covid-19 kemarin, dalam peer learning meeting kami banyak belajar dari Dinas dan Pengelola Perpustakaan lain mengenai bagaimana kegiatan dilakukan dengan penerapan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial”<sup>101</sup>*

Hal serupa disampaikan oleh pengelola perpustakaan Desa Tebes Lues, Ibu Novita Rahmayanti, beliau mengatakan:

*“Kami ada diundang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengikuti kegiatan PLM, itu se kabupaten ya, jadi ada beberapa orang pengelola perpustakaan desa, terus ada juga dari Dinasnya kami disitu diskusi, sharing sampai mana udah dan kegiatan apa apa aja yang kami buat untuk layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial terus nanti dari Dinas memaparkan apa-apa aja program mereka selanjutnya, mereka juga menyarankan kegiatan seperti apa yang dilakukan kedepannya dari para pengelola perpustakaan desa juga gitu nanti mereka bilang kami udah buat kegiatan ini minsalnya seperti desa Kala Kemili jadi orang tu buat saos terus mereka cerita bagaimana proses pembuatannya, dampaknya untuk masyarakat, antusias masyarakat bagaimana jadi PLM nya seperti bercerita, diskusi ringan, tanya jawab ini menurut saya sangat bermanfaat sekali dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosialnya bagi pengelola perpustakaan, jadi kami termotivasi lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Terus ada juga dek PLM dari Nasional sama Provinsi itu biasanya lewat zoom meeting di perpustakaan masing-masing tapi Dinas Perpustakaan*

---

<sup>101</sup> Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili, Pada 23 September 2022, Pukul 16.00 WIB

*dan Kearsipan juga menyediakan fasilitas kalau mau ikut zoom meetingnya disana, itu sama juga seperti yang dikabupaten nanti diskusi, dikasih arahan dan lain-lain”.*<sup>102</sup>

Lebih lanjut pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru, Ibu Ramlana Safitri, mengatakan:

*“selain beberapa kegiatan tadi ada juga peer learning meeting yang dibuat oleh Dinas untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, peer learning ini ada se kabupaten, se provinsi Aceh dan nasional, dalam peer learning meeting ini kita diajak untuk berdiskusi, sharing berbagi pengalaman mengenai sejauh mana layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan desa masing-masing”.*<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa PLM yang dilaksanakan dapat membantu pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, hal ini karena PLM bertujuan untuk mendorong pengelola perpustakaan desa untuk terus maju dan berkomitmen dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan desa masing-masing.

Perpustakaan harus menjadi wadah yang lebih aktif memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, menjadi wadah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat, tempat mencari informasi dan pusat berkegiatan bagi masyarakat yang saling berhubungan, berbagi pengalaman, saling belajar serta bertukar informasi dan mengembangkan keterampilan, melalui Peer Learning

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues Pada 25 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Ramlana Safitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Pada 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

Meeting ini pengelola perpustakaan dapat belajar untuk kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial selanjutnya.

#### *h. Stake Holder Meeting*

Stake holder meeting yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah berupa kegiatan mempertemukan para stakeholder atau pemegang kepentingan dalam Kabupaten maupun pihak swasta. Adapun tujuan dilakukannya stake holder meeting ini untuk membangun kesadaran para pemegang kepentingan mengenai pengembangan perpustakaan salah satunya yaitu layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, kemudian untuk membangun rencana berkelanjutan dari para stakeholder.

Mengenai stake holder yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Ibu Sukmawati, staff Bidang pengembangan dan pembinaan bahan Pustaka sekaligus Pic (penanggung jawab) transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, beliau mengatakan:

*“ Untuk Stake Holder Meeting ini biasanya kita lakukan dengan Kepala Daerah yaitu Bupati Aceh Tengah, Kepala-Kepala Dinas selingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah terus ada juga dari pihak swasta seperti LSM, dll. Disini tujuan kita untuk memberitahu bahwa pengembangan perpustakaan sudah sampai tahap ini, sudah ada layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan menjelaskan juga seperti apa layanan tersebut <sup>104</sup>”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati tersebut, *bahwa stake holder meeting* adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyamakan tujuan,

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

mendapatkan dukungan dan menjalin kerjasama antara Dinas Perpustakaan, Pengelola Perpustakaan Desa dengan para *stake holder* untuk mengembangkan layanan berbasis inklusi sosial kedepannya.

i. Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat merupakan salah satu hasil dari proses pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah pada 3 perpustakaan desa yaitu perpustakaan desa Kala Kemili, perpustakaan desa Tebes Lues dan perpustakaan desa Paya Tumpi Baru.

Mengenai pelibatan masyarakat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mengatakan:

*“Pelibatan masyarakat salah satu kegiatan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan, pelibatan masyarakat ini dalam artian pengembangannya kan dilakukan dengan berbagai cara sebelumnya jadi pelibatan masyarakat ini merupakan hasilnya ya, jadi ada beberapa kegiatan berbasis inklusi sosial dilakukan di perpustakaan ini, perpustakaan ini dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat dan kegiatannya tersebut bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri”.*<sup>105</sup>

Ibu Sukmawati, staff bidang pengembangan dan pembinaan bahan pustaka sekaligus Pic (penanggung jawab) transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mengenai pelibatan masyarakat mengatakan:

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Jefridin Siregar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Pada 27 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

*“Selanjutnya ada pelibatan masyarakat, pelibatan masyarakat ini maksudnya perpustakaan desa itu dituntut harus memiliki kegiatan yang melibatkan masyarakat di desa tersebut, tujuan dari kegiatannya itu untuk menunjang ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Rata-rata kegiatan yang sudah dilakukan itu berbentuk pelatihan mengolah produk dengan hasil jual, kan dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat jadi termotivasi membuat ini terus dijual, dipasarkan, mereka mendapatkan feedback dari pelatihan itu”.*<sup>106</sup>

Pengelola perpustakaan desa Kala Kemili, Perpustakaan desa Tebes Lues dan perpustakaan Paya Tumpi Baru mengenai pelibatan masyarakat mereka mengatakan:

*“Untuk pelibatan masyarakat ada beberapa kegiatan yang kami lakukan selama menjadi perpustakaan desa dengan layanan berbasis inklusi sosial, rata-rata kegiatan tersebut berbentuk pelatihan-pelatihan mengolah produk dan kegiatan peningkatan literasi”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pelibatan masyarakat sudah dilakukan di 3 perpustakaan desa, adapun kegiatan pada masing-masing perpustakaan desa tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Perpustakaan desa Kala Kemili

Pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dilakukan pada perpustakaan desa Kala Kemili sejak tahun 2021, adapun kegiatan yang

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

sudah dilakukan perpustakaan desa kala kemili dari hasil pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah adalah:

- a. Pelatihan membuat saos kemasan
- b. Pelatihan membuat konektor masker
- c. Pelatihan membuat jilbab payet
- d. Bimbingan komputer untuk anak-anak

(2) Perpustakaan desa Tebes Lues

Perpustakaan desa tebes lues dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sejak tahun 2019, adapun kegiatan pelibatan masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan membuat rak pot gantung
- b. Peningkatan literasi anak dan bimbingan belajar
- c. Membuat apotek hidup bersama PKK
- d. Pelatihan membuat minuman kopi kertup

(3) Perpustakaan desa Paya Tumpi Baru

Perpustakaan desa Paya Tumpi Baru dikembangkan sejak tahun 2019 menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, adapun kegiatan pelibatan masyarakat yang telah dilakukan adalah:

- a. Bimbingan belajar anak-anak
- b. Kerjasama UMKM
- c. Pelatihan dasar komputer
- d. Pelatihan merajut

e. Pelatihan membuat bouquet bunga

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan pada 3 perpustakaan desa oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan beberapa kegiatan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, menambah wawasan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

## 2) Kendala Dalam Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial

Dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah serta pengelola perpustakaan desa yang dikembangkan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Jeffridin Siregar memaparkan:

*“Dalam pengembangan suatu hal pastinya ada beberapa kendala yang dihadapi, begitu juga dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ini, berdasarkan penuturan dari Ibu Sukmawati sebagai penanggung jawab ada beberapa hal yang menjadi kendalanya seperti anggaran, rendahnya SDM dan kurangnya support dari pemerintah desa, untuk lebih jelasnya hal yang menjadi kendala bisa ditanyakan kepada ibu Sukma sebagai penanggung jawab dalam pengembangan ini ya”*<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Jeffridin Siregar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Pada 27 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

Dari penjelasan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dihadapi, adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Anggaran

Setiap organisasi sudah seharusnya memiliki anggaran untuk membiayai keperluan operasional, intensif pegawai dan lain-lain. Anggaran merupakan hal yang sangat penting dan perlu disiapkan perpustakaan agar kegiatan-kegiatan dan pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal.

Berikut keterangan dari Ibu Sukmawati, staff dari Bidang Pengembangan dan Pembinaan bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, beliau sekaligus PIC (Penanggung jawab) program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

*“yang menjadi kendala dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan Dinas yaitu keterbatasan anggaran, anggaran itu kan paling penting ya kadang kalau mau buat kegiatan itu harus ada anggaran dulu baru bisa dilaksanakan kegiatan tersebut, terus ditambah kalau kami harus berkunjung dan melakukan pendampingan langsung ke lapangan artinya ke perpustakaan desa pasti membutuhkan biaya operasional kan, terus ngadain bimbingan teknis juga diperlukan biaya walaupun ada anggaran dari Dinas tapi kami harus bisa meminimalisir dan*

---

*menggunakannya secara optimal. Apalagi kemarin covid-19 disitu semua anggaran dipotong dari pusat ya jadi selama tahun 2020-2021 itu anggaran kita minim sekali, banyak juga perpustakaan desa yang vakum melakukan pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Bisa dibilang anggaran itu unsur yang sangat penting dalam menjalankan perpustakaan kalau anggaran tidak ada mau seprofesional apapun pengelola perpustakaan desanya tetap saja perpustakaanya tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik”<sup>108</sup>*

Berikut juga penuturan dari pengelola perpustakaan desa Tebes Lues, beliau mengatakan:

*“ Kendala dalam pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di perpustakaan desa kami itu ada di anggaran dek keterbatasan anggaran, perpustakaan dengan layanan berbasis inklusi sosial itu kan identik dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hidup masyarakat, jadi kita perpustakaan sebagai wadah dan memfasilitasi kegiatan tersebut pastinya membutuhkan dana, selama ini dana yang kami gunakan ada dari Dinas, seharusnya ada dari dana desa juga tapi untuk tahu 2020-2021 dana desa masih digunakan untuk menanggulangi covid-19, hal tersebut bukan berarti kami ngga buat kegiatan kami buat kegiatan dengan biaya yang minim minsalnya pembuatan masker kopi,*

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

*pelatihan komputer untuk anak-anak dan les mata pelajaran untuk anak-anak juga* <sup>109</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh pengelola perpustakaan desa Kala Kemili, beliau mengatakan:

*“ Kendalanya ada di anggaran dek, kalau buat kegiatan kayak pelatihan gitu pastinya pakai biaya apalagi yang melibatkan masyarakat, biaya untuk bahan-bahan, alat-alat, pematerinya juga konsumsi tapi sekarang kami belum ada dana sendiri dek, itulah kendalanya ”* <sup>110</sup>

Pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru, Ibu Ramlana Safitri juga membenarkan bahwa kendala dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang mereka hadapi adalah anggaran, beliau mengatakan:

*“Salah satu kendala yang kami hadapi dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adalah keterbatasan anggaran, anggaran di sini baik berupa biaya untuk membuat kegiatan maupun intensif pengelola perpustakaan desa”* <sup>111</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala bagi pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dan Pengelola Perpustakaan Desa dalam

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues Pada 25 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>110</sup> Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili, Pada 23 September 2022, Pukul 16.00 WIB

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Ramlana Safitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Pada 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial karena dalam pengembangan perpustakaan perlunya harus memiliki dana untuk biaya operasional, keperluan pegawai dan lainnya.

b. Rendahnya SDM

Bagi pengembangan sebuah perpustakaan diperlukan SDM yang memadai, salah satunya pengelola perpustakaan. Kurang memadainya SDM menjadi kendala pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dirasakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Sukmawati SH dari bidang pengembangan dan pembinaan bahan Pustaka, beliau menuturkan:

*“Kurangnya SDM di perpustakaan desa menjadi salah satu kendala bagi kami dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, kita sudah melakukan upaya dan Langkah-langkah dalam mengembangkan namun SDM nya tidak merealisasikan sama aja layanan perpustakaan berbasis inklusi sosialnya engga jalan, satu lagi kesadaran dari SDM nya kurang banyak dari perpustakaan desa hanya kepala perpustakaan saja yang kerja, padahal SDMnya terkadang sampai 5 orang disana, namun yang kerja dan bertanggung jawab Cuma 1 orang, itu salah satu kendala bagi kami padahal kalau SDMnya memadai memiliki tanggung jawab dan kesadaran pasti banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat walaupun anggarannya minim kan, hanya ada beberapa perpustakaan desa yang pengelola perpustakaan itu berlatar*

*belakang pendidikan S1 selain itu SMA itu juga persyaratan dari kami untuk pengelola perpustakaan desa minimal tamatan SMA ”<sup>112</sup>*

Hal ini juga disampaikan oleh pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru, beliau mengatakan:

*“Kurangnya SDM jadi kendala buat kami dek, kalau kami buat kegiatan sebagai pengelola agak kewalahan, terkadang kami juga minta bantuan sama aparat desa, padahal kalau SDMnya memadai pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial pasti bisa dilakukan secara optimal karena kan pasti banyak ide-ide baru yang bisa direalisasikan untuk program tersebut”.*<sup>113</sup>

Serupa dengan pengelola perpustakaan desa Paya Tumpi Baru, pengelola perpustakaan desa Kala Kemili mengatakan:

*“ Kendala yang kedua itu ada di SDM dek, Cuma ibu sebagai kepala perpustakaan desa terus ibu ini yang Kelola Cuma berdua kami dek, padahal dari Dinas kan di suruh 5 orang pengelola perpustakaan desa agar pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat dilakukan itu 1 kepala perpustakaan, 1 PIC atau penanggung jawab, terus 3 orang di bidang layanan tapi kan karena mereka bekerja harus ada insentif sedangkan insentif 2 tahun ini kan tertahan untuk covid jadi ngga ada yang mau jadi pengelola perpustakaan dek, kendalanya disitu dek kurang juga kesadaran*

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ibu Ramlana Safitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Pada 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

*masyarakat akan manfaat dari perpustakaan jadi ngga ada yang kerja di perpustakaan”.*<sup>114</sup>

Lebih lanjut Pengelola perpustakaan desa Tebes Lues, Ibu Novita Rahmayanti juga mengatakan:

*“ Kendala yang kami rasakan dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang lain itu ada pada rendahnya SDM, pengelola perpustakaan desa yang dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang disarankan oleh Dinas itu seharusnya berjumlah 5 orang, 1 orang kepala perpustakaan, 1 orang Pic, 3 orang dibagian layanan, namun pada kenyataannya walaupun jumlah SDM sudah terpenuhi kalua tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pekerjaannya kan sama saja kegiatan yang dibuat nanti ngga jalan, ini disebabkan faktor intensif juga ya”*

<sup>115</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang informan tersebut kendala dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah adalah di Faktor SDM, kurangnya kesadaran dan tidak memadainya SDM, SDM menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial agar kegiatan dan planning kedepannya dapat direalisasikan dengan baik.

### c. Kurangnya Dukungan Pemerintah Desa

<sup>114</sup> Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili, Pada 23 September 2022, Pukul 16.00 WIB

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues Pada 25 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

Perpustakaan yang berada di desa merupakan fasilitas bagi masyarakat desa untuk mencari informasi, mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi diri sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari pihak pemerintahan desa, namun kurangnya dukungan dari pemerintahan desa menjadi salah satu kendala dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dirasakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah secara khusus.

Berikut penuturan dari Ibu Sukmawati, SH beliau mengatakan:

*“ kendala dalam pengembangan kurangnya support dari pemerintahan desa, kami melihat dilapangan ada beberapa perpustakaan desa yang kurang mendapatkan dukungan dari pemerintahan desanya, jadi kami sedikit sulit untuk melakukan pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial disana, pemerintah desanya seperti menutup mata apalagi masalah anggaran perpustakaan yang ada di dana desa, seharusnya disana udah ada insentif juga untuk pengelola perpustakaan kalau minsalnya itu tidak diberikan mereka kurang semangat ya untuk melakukan dan mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, itu hanya beberapa perpustakaan desa aja ya seperti itu tapi kebanyakan dari 10 perpustakaan desa yang kami kembangkan pemerintah desanya mendukung<sup>116</sup>”.*

Dari penuturan beliau dapat kita ketahui bahwa dukungan pemerintahan desa menjadi salah satu hal yang harus ada dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa, kurangnya dukungan dari pemerintahan desa menjadi kendala

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka, Pada 21 September 2022, Pukul 10.00 WIB

dikarenakan membuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak mampu mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial secara optimal dan mempengaruhi beberapa faktor salah satunya yaitu insentif dari pengelola perpustakaan desa.

## 2. Pembahasan

Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang berada di desa dan telah memiliki layanan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat pengguna perpustakaan desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara informan mengatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mengembangkan dan membina beberapa perpustakaan desa menjadi perpustakaan yang memiliki layanan berbasis inklusi sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah memiliki fokus kegiatan dalam pengembangan tersebut yaitu melakukan pengembangan kreativitas masyarakat melalui kegiatan pelibatan masyarakat berbentuk pelatihan-pelatihan mengolah produk yang bernilai jual. Dalam hal ini perpustakaan desa yang dibina dan dikembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial sudah berperan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta sebagai penyedia fasilitas pengembangan kreativitas masyarakat dan menjadi wadah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah juga dilakukan dengan beberapa kegiatan yang diamanahkan oleh Perpustakaan Nasional, adapun kegiatan tersebut yaitu:

a. Pemberian fasilitas Kepada Perpustakaan Desa

Fasilitas yang diberikan merupakan pemberian dari Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, fasilitas yang diberikan yaitu berupa komputer, printer, TV, Koleksi, Rak Buku dan Server. Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh pengelola perpustakaan desa untuk mengimplementasikan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial kepada pengguna perpustakaan, seperti memanfaatkan komputer untuk fasilitas pembelajaran masyarakat.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ialah dilakukan selama 3 bulan pada awal tahun dan sosialisasi ini dilakukan oleh tim dari bidang pengembangan dan pembinaan bahan pustaka, adapun materi sosialisasi yang disampaikan yaitu menyangkut peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, peningkatan mekanisme pelibatan masyarakat, pemberian dukungan dan membangun komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah memberikan manfaat bagi pengelola perpustakaan desa dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

c. Bimtek Pengelola Perpustakaan

Bimbingan teknis pengelola perpustakaan dilakukan bagi seluruh pengelola perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah secara umum, adapun materi yang disampaikan pada bimbingan teknis tersebut yaitu berupa materi jadwal buka tutup perpustakaan, pengolahan koleksi, dan peningkatan minat baca masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya bimbingan teknis ini yaitu sebagai bekal bagi pengelola perpustakaan desa dalam mengembangkan layanan berbasis inklusi sosial secara optimal.

#### d. Bimtek Revitalisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Bimtek revitalisasi ini dilakukan bagi pengelola perpustakaan desa yang telah mengikuti program perpustakaan berbasis inklusi sosial, dimana bimbingan teknis ini dilakukan secara bertahap yaitu pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan bimbingan teknis ini di Nasional maupun Provinsi dan berikutnya dilakukan untuk pengelola perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten. Tujuan dilakukannya bimtek ini yaitu sebagai evaluasi dan penguat bagi tim maupun pengelola perpustakaan desa dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

#### e. Advokasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah melakukan advokasi dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, advokasi yang dilakukan yaitu bersama pemerintah desa baik kepala desa maupun perangkat desa. Tujuan dilakukannya advokasi ini yaitu untuk mendapatkan

dukungan berupa materi maupun lainnya agar pengembangan layanan perpustakaan desa dapat dikembangkan secara efektif.

f. Mentoring/Pendampingan

Mentoring dilakukan pada saat perpustakaan desa membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, dengan adanya mentoring yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah para pengelola perpustakaan desa mendapatkan perhatian dan merasa didukung untuk terus mengembangkan layanan tersebut pada perpustakaan desa yang mereka kelola.

g. *Peer Learning Meeting/ PLM*

*Peer Learning Meeting* dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dengan cara memfasilitasi pengelola perpustakaan desa untuk saling belajar, dan berbagi pengalaman selama mereka mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, *Peer Learning Meeting* yang dilakukan bertujuan untuk pengelola perpustakaan desa agar mereka tetap terus maju dan mendapatkan motivasi untuk terus melakukan pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial pada perpustakaan desa yang dikelola.

h. *Stake Holder Meeting*

*Stake Holder Meeting* merupakan kegiatan mempertemukan pemegang kepentingan, di sini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah

mengadakan *stake holder meeting* bersama pemegang kepentingan di Kabupaten Aceh Tengah yaitu Kepala daerah, Pihak Dinas terkait maupun swasta, dilakukannya *stake holder meeting* bertujuan untuk menyamakan tujuan, menjalin kerjasama dan mendapatkan dukungan untuk mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

#### i. Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat merupakan hasil dari pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, pada perpustakaan desa Tebes Lues kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan yaitu Pelatihan membuat rak pot gantung, pelatihan membuat minuman kopi kertup, peningkatan literasi anak dan bimbingan belajar, serta membuat apotek hidup.

Pada perpustakaan desa Kala Kemili kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan berupa pelatihan membuat saos kemasan, pelatihan membuat konektor masker, pelatihan membuat jilbab payet dan bimbingan komputer untuk anak-anak. Kemudian pada perpustakaan desa Paya Tumpi Baru pelibatan masyarakat dilakukan dalam kegiatan bimbingan belajar anak-anak, Kerjasama UMKM, pelatihan dasar komputer, pelatihan merajut dan pelatihan membuat bouquet bunga.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada perpustakaan desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat sudah dilakukan dengan efektif.

Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ini yaitu keterbatasan anggaran, rendahnya SDM dan kurangnya dukungan pemerintah desa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, maka penulis menyimpulkan:

1. Pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan beberapa kegiatan pengembangan, adapun kegiatan tersebut yaitu: pemberian fasilitas kepada perpustakaan desa, Sosialisasi, Bimtek Pengelola Perpustakaan, Bimtek Revitalisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Advokasi, *Peer Learning Meeting* (PLM), *Stake Holder Meeting* dan Pelibatan Masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adalah Keterbatasan anggaran, Rendahnya SDM dan Kurangnya Dukungan Pemerintahan Desa.

#### B. Saran

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah seharusnya membentuk tim khusus pengembangan layanan

perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang terdiri dari beberapa orang agar pengembangan yang dilakukan berjalan secara optimal.

2. Sebaiknya pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membuat peraturan daerah secara tertulis terkait Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial maupun regulasi mengenai anggaran dan untuk menyikapi kendala yang dihadapi dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, sebaiknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan bantuan dan dukungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif. Syria Studies*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Asnawi. Perpustakaan Desa sebagai Sumber Layanan Informasi Utama. *Media Pustakawan* 22, no. 3 (2015).
- Ayu Wulansari, Lilis Surmayanti, Aldo Redho Syam. "Dampak Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Publis*. 2021. Diakses melalui <http://eprints.umpo.ac.id>
- Dwi Puspita Sari, Yuli Rohmiyati. "Peran Pembinaan Perpustakaan Pada Eksistensi Perpustakaan Desa di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora." 2017. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23179>.
- Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya, 2020. <http://www.academia.edu>.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.
- Hartono. *Dasar- Dasar Manajemen Perpustakaan dari Masa ke Masa*. Malang: UIN Maliki Pers, 2015.
- Hartono. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta, 2016.
- Humas Arpus Aceh. "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Upaya Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan," 2022. <http://arpus.acehprov.go.id>.
- Ilmi, Ayu Rizqi, dan Jazimatul Husna. "Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Demak Dengan Mitra Kerja Perpuseru (Studi Kasus: Perpustakaan Desa Kenanga, Perpustakaan Desa Melati dan Perpustakaan Desa Nusa Indah ). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23140>.
- J, Moleong Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung, 2017.
- Khairunisa. "Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat ( Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi)" 2507, no. February (2020): 1–9. <http://repository.uinjambi.ac.id>.

- Krismayani, Ika. "Mewujudkan Fungsi Perpustakaan di Daerah." *Anuva* 2, no. 2 (2018): 233. <https://doi.org/10.14710/anuva>.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan." *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1. 2021.
- Mahdi, Reza, Reza Mahdi, Fakultas Sastra, Program Studi, Ilmu Perpustakaan, Universitas Negeri Malang, dan Jl Cakrawala No. "Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Community Empowerment by the Public Library of Magelang Regency in Realizing Social Inclusion-Based Library Services berbasis a," 2020.
- Mahdi, Reza. "Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial: Apa dan Bagaimana Penerapannya? (Sebuah Kajian Literatur)." *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* no.2.2020. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.152.201-215>.
- Mussuryani. "Peran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Dalam Menumbuhkan Budaya Literasi Masyarakat Kabupaten Tebo." Uin Sultan Thaha Saifuddin, 2019.
- Musvita Sari. "Manfaat Perpustakaan Desa Untuk Pendidikan Non Formal Masyarakat Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang," 2019.
- Neneng Komariah, Encang Saepudin, Evi Nursanti Rukmana. "Pelayanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Desa Jendela Dunia Kabupaten Kuningan Jawa Barat Neneng Komariah, Encang Saepudin, Evi Nursanti Rukmana" 17, no. 1 (2021).
- Ningsih, Ubay Gusti Ayu. "Tingkat kepuasan pihak bank sumut cabang syariah medan pada," 2021, 1–66. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12608>.
- Nisak, I R. "Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa Sebagai Pusat Belajar Masyarakat (Studi Pada Perpustakaan Mandiri Cendekia Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan 2018. <http://repository.ub.ac.id>
- Nurlizar. "Analisis Pemanfaatan Buku Konvensional Dan E-Book Oleh Mahasiswa Hukum Di Perpustakaan Unsyiah," 2016.
- Peraturan Kepala Perpustakaan RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Kepustakawanan Berbasis Inklusi Sosial, 2017, <https://press.perpusnas.go.id>.

- Pergub Kalbar. “Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 40 tahun 2019 tentang Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kalimantan Barat,” 2019. <https://jdih.perpusnas.go.id/detail/307>.
- Perpusnas. “Peraturan Kepala Perpusnas RI No 21 Tahun 2017” 15, no. 2 (2016): 1–23.
- Perpustakaan Nasional RI, Indonesia. *Standar Nasional Perpustakaan Provinsi, Kab / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan*, 2019.
- Prasetyo, Wahyu Deni, dan Dian Utami. “Penguatan Perpustakaan Untuk Pembangunan: Sebuah Konsep Transformasi Berbasis Inklusi Sosial.” *Jurnal IPI* <http://ipi.web.id/jurnal/index.php/jurnalipi/article/view/45>.
- Profil Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.
- Purwanto Putr, Siti Khoiriyah. *Manajemen Perpustakaan Desa*. Bandar Lampung: Yayasan Petualang Literasi, 2020. <http://repository.lppm.unila.ac.id>.
- Putra, Prima, Budi Gutama, dan Bambang Widiyahseno. “Inklusi sosial dalam pembangunan desa” 10 (2020): 70–80.
- Rahman, Rani Auliawati. “Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Membaca Malang,” no. February (2019).
- Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, <http://www.bappenas.go.id>.
- RI, Perpustakaan Nasional. “Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Rencana Strategis Tahun 2020-2024,” 2020.
- Rindi Antiwi. *Stratgei Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ACEh Tengah dalam Pemngelolaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Universitas Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id>.
- Riyanda, Isna Thia. “Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Desa Sekip Kabupaten Deli Serdang Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 1, no. 3 (2021): 82–91.
- Santoso, Joko; Hukum, Biro, Perencanaan Perpustakaan, dan Nasional Ri. “Hak masyarakat terhadap layanan Perpustakaan,” 2019, 24.

- Septiani, Yuni, Edo Aribbe, dan Risnal Diansyah. “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru).” *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (2020): 131–43. <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>.
- Setiawani, Indah. “Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ( Penelitian di Desa Paya Tumpi baru Aceh Tengah ),” no. 1996 (2021): 6.
- SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001.
- Standar Nasional Perpustakaan. “Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota,” 2011, 3.
- Surokim, Yuliana Rakhmawati. *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*, 2016. [komunikasi.trunojoyo.ac.id](http://komunikasi.trunojoyo.ac.id).
- Susanti, Dian Arya. “Implementasi Konsep Inklusi Sosial di Perguruan Tinggi; sebuah wacana.” *Media Pustakawan* 26, no. 3 (2019): 224–32. <https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/543>.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. NilaCakra Publishing House, Bandung, 2018. <http://staff.ub.ac.id>
- Tjahjanulin Domai, Niken Lastiti. “Pelatihan Pengolahan Koleksi Dalam Mendukung Pengembangan Perpustakaan” 02, no. September (2018): 69–83.
- Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019. <http://repository.iainponorogo.ac.id>.
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007. <https://jdih.perpusnas.go.id>.
- Waas, Nofita. “Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka Di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi (Bpad) Provinsi Sulawesi Utara.” 2016. <https://www.neliti.com/publications/94909/pendayagunaan-koleksi-bahan-pustaka-di-badan-perpustakaan-arsip-dan-dokumentasi>.
- Wawancara Dengan Bapak Jefridin Siregar, Kepala Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah pada 27 September 2022.

Wawancara Dengan Ibu Saumi Mahara, Pengelola Perpustakaan Desa Kala Kemili pada 23 September 2022.

Wawancara Dengan Ibu Novita Rahmayanti, Pengelola Perpustakaan Desa Tebes Lues pada 25 September 2022.

Wawancara Dengan Ibu Ramlana Fitri, Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru pada 1 Oktober 2022.

Wawancara Dengan Ibu Sukmawati, Staff Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka pada 21 September 2022.

Wilinny, Chrissyca Halim, Sutarno Sutarno, Ngajudin Nugroho, dan Fauzi Akbar Maulana Hutabarat. "Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan." *Jurnal Ilmiah Simantek* 3, no. 1 (2019): 1–6.

Yessaya Yehuda. "Sistem Pelayanan Terbuka Pada Interior Perpustakaan Umum di Kota Semarang. 2017 <https://media.neliti.com/media/publications/102910-ID-sistem-pelayanan-terbuka-pada-interior-p.pdf>.



**Lampiran:**



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR: 743/UH.08/FAHKP.004/05/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran ujian skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.

**Kesatu :** Menunjuk saudara :  
1). Nazanuddin, M.LIS., PH.D. (Pembimbing Pertama)  
2). Asnawi, M.P. (Pembimbing kedua)

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa  
**Nama :** Bulqisma Putri  
**Nim :** 180503013  
**Prodi :** Ilmu Perpustakaan (IP)  
**Judul :** Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah

**Kedua :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 18 Mei 2022

Dekan

Fauzi

**Tembusan:**

1. Rector UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ketua Prodi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Wakilnya UIN Ar-Raniry;
4. Yang bersangkutan atau diwakili dan keluarganya;
5. Asip



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Kauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7527321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2169/Un.08/FAH.I/PP.00.9/09/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah
2. Kabid. Pembinaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
3. Kepala Perpustakaan Desa Tebes Lues
4. Kepala Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru
5. Kepala Perpustakaan Desa Kemili

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BULKISMA PUTRI / 180503013**

Semester/jurusan : **IX / Ilmu Perpustakaan**

Alamat sekarang : **Baitussalam, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 September 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,

الرانيري

AR - RANIRY



Berlaku sampai : 16 Desember  
2022

Dr. Nazaruddin, M.L.I.S.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

فمرنته كبوفا ن اچيه تعته  
دينس فرقسكان دان كوآرسيفان

Jalan Commodore Yos Sudarso No.6 Telp (0643) 21912 Fax.(0643) 8001809 Takengon

Takengon, 27 September 2022 M  
01 Rabiul Awal 1443 H

Nomor : 045/  
Lampiran : -  
Silat : Biasa  
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.  
Pimpinan Fakultas Adab dan  
Humaniora UIN Ar-raniry Banda Aceh  
di-  
Banda Aceh

Schubungan dengan surat Saudara Nomor 2169/Un.08/ FAH.DPP.00.9/09/2022  
Tanggal 16 September 2022 Perihal tersebut diatas atas nama mahasiswa :

Nama : BULKISA PUTRI  
NIM : 180503013  
Jurusan : Ilmu Perpustakaan  
Alamat : Baitussalam, Aceh Besar

Kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan dan saat ini telah selesai dalam rangka Penyusunan Skripsi  
dengan judul penelitian "Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi  
Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah".

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

A R - R

JEFFRIDIN SIRUGAR, AP., MM  
Pembina Tk. II NIP. 19751005 199412 1 001

**SURAT BALASAN**

No : 08/09/2022

Lampiran :-

Hal : BALASAN PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA

Kepada Yth :

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2169/Un.08/FAHLI/PP.00.9/09/2022

Tanggal 16 September 2022 perihal penelitian ilmiah mahasiswa atas nama :

Nama : BULKISMA PUTRI

Nim : 180503013

Jurusan : Ilmu Perpustakaan

Alamat : Baitussalam, Aceh Besar

Telah kami setuju dan melakukan penelitian di Perpustakaan Desa Kala Kemili sebagai penyusunan skripsi dengan judul :

**" Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah".**

Demikian surat ini kami sampaikan dan terimakasih.

Aceh Tengah, 2 Oktober 2022  
Kepala Perpustakaan Desa Kala Kemili

  
*[Signature]*  
Sugri Mahara, S.Pd.LM.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN KEBAYAKAN**  
**KAMPUNG PAYA TUMPI BARU**

*Jalan Takengon Bireuen Km 4,5 Nomor 55 Takengon*

Paya Tumpi Baru, 19 September 2022

Nomor : 205 /PTB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Universitas Islam Negeri Ar  
Raniry Fakultas Adab dan Humaniora  
Di\_ Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Fakultas Adab dan Humaniora Nomor 2169/Un.08/FAH.I/PP.00.9/09/2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa Awal atas nama :

Nama : **BULKISMA PUTRI**  
Nim : 180503013  
Alamat : Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Nama tersebut telah melakukan Pengambilan Data Awal di Kampung Paya Tumpi Baru , dengan judul "Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah". Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

د الكرابرى  
D KELUARKAN DI : PAYA TUMPI BARU  
PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2022

AR - RANIRY  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
KAMPUNG PAYA TUMPI BARU



**IDRUS SAPUTRA, S.Pd**

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh

Tengah

No	Pertanyaan
1	Menurut bapak/ibu bagaimana progress pengembangan dan pembinaan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah?
2.	Sudah berapa lama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah menjalankan Program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial?
3.	Apakah ada kebijakan khusus yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh tengah mengenai layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial?.
4.	Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial?
5.	Langkah – Langkah apa saja yang sudah dan akan dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahan Pustaka

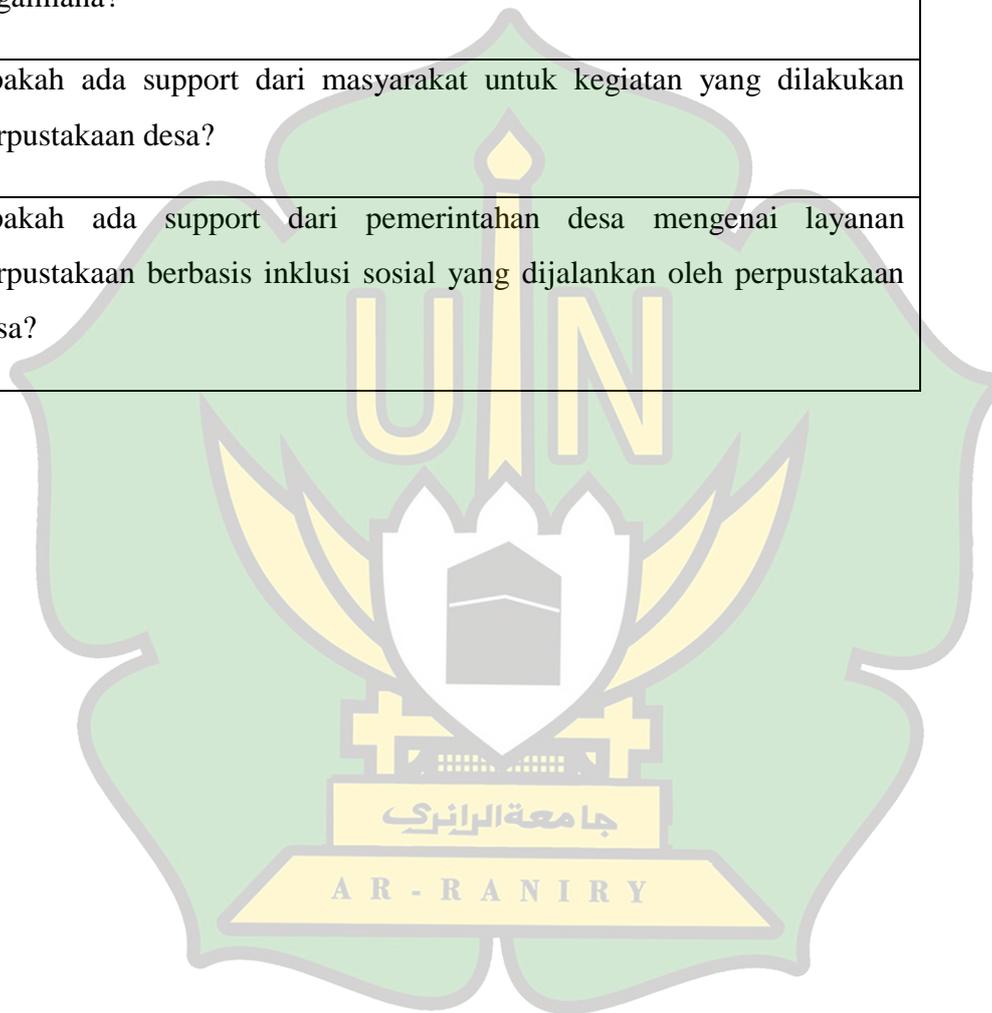
No	Pertanyaan
1	Sejak kapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mulai mengembangkan program pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial?
2.	Ada berapa perpustakaan desa yang dikembangkan dan dibina menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Aceh Tengah?
3.	Apakah sampai saat ini perpustakaan desa tersebut masih aktif menjalankan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial?
4.	Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ?
5.	Apakah ada bimbingan khusus untuk pengelola perpustakaan desa dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ? Jika ada , apa saja bentuk bimbingan tersebut ?
6.	Dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial apakah hanya pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dan Pengelola perpustakaan desa yang terlibat ? Apakah ada pihak lain?
7.	Apa saja indikator dalam memilih perpustakaan desa yang dapat di bina dan di kembangkan menjadi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial?
8.	Dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial apakah ada hambatan atau kendala yang ditemukan ?
9.	Dalam proses pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adakah di temukan peluang pada perpustakaan desa?

<b>10.</b>	Mengenai anggaran, apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah menyediakan anggaran khusus dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial?
<b>11.</b>	Layanan apa saja yang digunakan dalam mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial?
<b>12.</b>	Bagaimana bentuk pelibatan masyarakat secara langsung selain kegiatan mengolah produk dari hasil bumi?

### C. Daftar Pertanyaan Untuk Pengelola Perpustakaan Desa

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>
<b>1</b>	Sejak kapan perpustakaan desa ikut dikembangkan dan dibina menjadi perpustakaan desa dengan layanan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah?
<b>2</b>	Apakah ada bimbingan khusus bagi pihak pengelola perpustakaan desa dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah?
<b>3</b>	Layanan apa saja yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial?
<b>4</b>	Sejauh ini kegiatan apa saja yang dilakukan pihak pengelola perpustakaan dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan desa ini?
<b>5</b>	Dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial apakah ada hambatan atau kendala yang ditemukan?

6	Apakah saat ini perpustakaan desa ini masih aktif dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial?
7	Apakah ditemukan peluang dan tantangan dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial?
8.	Mengenai anggaran apakah perpustakaan menerima anggaran dari Pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah atau bagaimana?
9.	Apakah ada support dari masyarakat untuk kegiatan yang dilakukan perpustakaan desa?
10.	Apakah ada support dari pemerintahan desa mengenai layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dijalankan oleh perpustakaan desa?



## DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

Dokumentasi wawancara bersama Informan.



## Dokumentasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat

### A. Perpustakaan Desa Tebes Lues



## B. Perpustakaan Paya Tumpi Baru



C. Perpustakaan Desa Kala Kemili



#### D. Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Bulkisma Putri  
Tempat/Tanggal Lahir : Takengon/09 Oktober 2000  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Pucuk Deku , Desa Tebes Lues,  
Kec. Bies, Kab. Aceh Tengah  
Pekerjaan : Mahasiswa
2. Riwayat Pendidikan  
SD/MIN : SDN 7 BIES  
SMP/MTSN : MTsN 1 TAKENGON  
SMA/MAN : SMAN 15 TAKENON BINAAN  
NENGGERI ANTARA  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2023
3. Nama Orang Tua  
a. Ayah : M.Rizal  
b. Ibu : Irawati  
Pekerjaan  
a. Ayah : Petani  
b. Ibu : Guru  
Alamat : Jln. Pucuk Deku , Desa Tebes Lues,  
Kec. Bies, Kab. Aceh Tengah

Banda Aceh, 08 Desember  
2022

Bulkisma Putri  
NIM: 180503013